



LAPORAN

MBG

MAKAN
BERGIZI
GRATIS

KABUPATEN PASURUAN

2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan instrumen pengendalian pelaksanaan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis di wilayah Kabupaten Pasuruan. Dokumen ini merekam secara komprehensif langkah-langkah persiapan, kebijakan daerah, hingga kesiapan teknis implementasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Kami menyadari bahwa Program MBG bukan sekadar pemenuhan kebutuhan konsumsi semata, melainkan investasi jangka panjang daerah dalam menyongsong Generasi Emas 2045. Melalui intervensi gizi yang terstandarisasi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen penuh untuk mendukung penurunan prevalensi stunting serta peningkatan konsentrasi belajar peserta didik, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pasuruan.

Lebih lanjut, laporan ini juga menjadi rekam jejak atas dinamika lapangan dan solusi adaptif yang ditempuh oleh Satuan Tugas Daerah dalam menghadapi tantangan geografis maupun teknis operasional. Segala upaya mitigasi risiko dan pengendalian mutu yang tertuang di dalamnya mencerminkan keseriusan kami untuk memastikan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat mutu dapat terealisasi secara optimal di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Secara sistematis, laporan ini terdiri dari lima bab utama. Bab I menguraikan latar belakang dan urgensi program. Bab II menyajikan gambaran umum kondisi daerah sebagai basis data awal. Bab III memaparkan kerangka kebijakan nasional dan kelembagaan daerah, termasuk peran Satuan Tugas (Satgas). Bab IV menganalisis secara mendalam kesiapan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mekanisme distribusi, serta manajemen risiko. Terakhir, Bab V memuat kesimpulan dan rekomendasi strategis untuk keberlanjutan program.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran konstruktif sangat kami harapkan guna penyempurnaan di masa mendatang.

Kepada seluruh pihak, khususnya jajaran Satuan Tugas MBG Kabupaten Pasuruan dan Badan Gizi Nasional yang telah memberikan dukungan data dan koordinasi, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga dokumen ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, 31 Juni 2025

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan
Selaku Koordinator Bidang Koordinasi, Konvergensi
dan Perencanaan TPPS Kabupaten Pasuruan

BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR.....	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sasaran	11
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....	16
2.1 Kondisi Geografis dan Administratif	17
2.2 Demografi dan Kependudukan	23
2.3 Ekonomi.....	36
2.4 Ketenagakerjaan.....	43
2.5 Kemiskinan	46
2.6 Ketimpangan.....	49
2.7 Indeks Pembangunan Manusia	52
BAB III METODE PELAKSANAAN DAN TEKNIK OPERASIONAL.....	58
3.1 Desain Kelembagaan dan Manajemen Sumber Daya Manusia	59
3.2 Lokasi dan Spesifikasi Teknis Infrastruktur	63
3.3 Mekanisme Pendanaan dan Pengelolaan Aset	66
3.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Produksi dan Distribusi	70
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	77
4.1 Konsolidasi Kelembagaan dan Sinergi Lintas Sektor	78
4.2 Analisis Geospasial dan Kelayakan Teknis Lokasi SPPG.....	80
4.3 Analisis Kapasitas Layanan dan Target Sasaran (Catchment Area)	81
4.4 Kesiapan Infrastruktur Penunjang Vital.....	87
4.5 Tantangan Lapangan dan Strategi Mitigasi.....	89



BAB V PENUTUP	91
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Rekomendasi	92

DAFTAR TABEL

2.1	Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasuruan	22
2.2	Jumlah dan Struktur Umur Penduduk di Kabupaten Pasuruan.....	25
2.3	Kepadatan Penduduk	29
2.4	Persebaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023	31
2.5	Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2023	34
2.6	Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha.....	40
2.7	Indikator Utama Ketenagakerjaan, 2021-2023 (Kondisi Agustus).....	45
2.8	Indikator Kemiskinan Makro, 2021-2023 (Kondisi Maret)	47
2.9	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya, 2023.	53
3.1	Daftar Kepala SPPG Kabupaten Pasuruan	62
3.2	Skema Pembagian Tanggung Jawab Pembiayaan Program MBG	69
4.1	Data Jumlah Penerima Manfaat dengan Kategori SMA/Sederajat	82
4.2	Data Jumlah Penerima Manfaat dengan Kategori SD/SMP.....	83
4.3	Data Jumlah Penerima Manfaat dengan Kategori 3B Bumil, Busui, Balita	85

DAFTAR GAMBAR

1.1	Strategi Arsitektur Ekosistem Badan Gizi Nasional.....	3
2.1	Peta Administrasi Kabupaten Pasuruan.....	18
2.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023	27
2.3	Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2023	35
2.4	HLS dan RLS Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2023.....	36
2.5	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2023 (%)	39
2.6	Inflasi Kabupaten Pasuruan/Kota Probolinggo, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2023.....	42
2.7	Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024	50
2.8	Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024	51
3.1	Peta Citra Satelit dan Dokumentasi Eksisting Lahan SPPG Bangil	64
3.2	Progres Konstruksi Struktur SPPG Kraton.....	65
3.3	Kutipan Regulasi Permendagri No. 15 Tahun 2024	68
3.4	Alur Produksi dan Distribusi Kabupaten Pasuruan	70
3.5	Pemorsian dan Pendistribusian MBG Kabupaten Pasuruan.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks dinamika global abad ke-21, mandat konstitusional ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif, sehat, dan berdaya saing tinggi. Menyongsong satu abad kemerdekaan atau yang dikenal sebagai Visi Indonesia Emas 2045, Indonesia berada di ambang jendela peluang "Bonus Demografi". Namun, peluang ini dapat berubah menjadi bencana demografi apabila kualitas generasi muda sebagai pewaris estafet pembangunan tidak dipersiapkan secara fundamental, khususnya dalam aspek kesehatan dan kecukupan gizi sejak usia dini.

Gizi merupakan fondasi dasar dari pembentukan modal manusia (human capital). Bukti-bukti empiris dan studi kesehatan masyarakat secara konsisten menunjukkan bahwa status gizi pada masa tumbuh kembang anak memiliki korelasi linear yang kuat dengan kemampuan kognitif, daya tahan fisik, serta produktivitas di masa dewasa. Kondisi kekurangan gizi kronis, yang seringkali bermanifestasi dalam bentuk stunting atau gizi buruk, bukan hanya masalah kesehatan semata, melainkan ancaman serius terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, negara hadir melalui intervensi kebijakan yang bersifat struktural dan masif.

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan strategis melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini merupakan terobosan transformatif yang mengubah paradigma penanganan gizi dari sekadar bantuan sosial karitatif menjadi investasi negara yang terukur. Legitimasi yuridis dan operasional program ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Melalui regulasi ini, Pemerintah Pusat menegaskan bahwa pemenuhan gizi nasional adalah hak asasi manusia yang pengelolaannya harus dilakukan melalui tata kelola yang terencana, sistematis, dan akuntabel, mulai dari tingkat pusat hingga ke unit pemerintahan terkecil di daerah.

Dalam konteks lokal Kabupaten Pasuruan, urgensi implementasi Program MBG menemukan relevansi yang sangat krusial. Berdasarkan analisis terhadap data makro pembangunan daerah, Kabupaten Pasuruan menghadapi sebuah paradoks pembangunan manusia yang memerlukan intervensi spesifik. Di satu sisi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan telah mencapai status "Tinggi", yang menandakan adanya perbaikan pada dimensi kesehatan (Angka Harapan Hidup) dan standar hidup layak (Pengeluaran Per Kapita). Namun, di sisi lain, dimensi pengetahuan masih menyisakan tantangan struktural yang serius. Data menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Pasuruan masih tertahan di angka 7,46 tahun.

Secara statistik, angka 7,46 tahun setara dengan jenjang kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Realitas ini memberikan implikasi yang mendalam terhadap pola pengasuhan anak di tingkat rumah tangga. Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, memiliki korelasi erat dengan literasi gizi dan pemahaman mengenai pola asuh yang sehat. Rendahnya rata-rata pendidikan formal mengindikasikan adanya potensi kesenjangan pengetahuan dalam menyajikan asupan gizi seimbang di rumah. Dalam situasi inilah, peran institusi pendidikan (sekolah) menjadi sangat vital. Sekolah tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi harus bertransformasi menjadi benteng pertahanan terakhir untuk menjamin asupan gizi anak. Melalui Program MBG, negara mengambil alih tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan asupan makan bergizi lengkap dan susu yang memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG), terlepas dari kondisi sosial-ekonomi orang tuanya.

Lebih jauh lagi, pelaksanaan Program MBG di daerah juga didorong oleh instruksi teknis dari Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Instruksi ini menuntut Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk segera mengonsolidasikan aset dan sumber daya guna mendukung infrastruktur program. Kesiapan lahan untuk pembangunan dapur sehat (SPPG) menjadi indikator awal keseriusan daerah dalam menyambut program strategis ini.

Badan Gizi Nasional (BGN) telah merancang sebuah Arsitektur Ekosistem Pemenuhan Gizi yang komprehensif. Model ini mengintegrasikan rantai pasok dari hulu ke hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular. Di sektor hulu, program ini didesain untuk menyerap komoditas pangan lokal (beras, sayur, telur, daging, susu) dari petani, peternak, dan Koperasi/UMKM di sekitar wilayah Kabupaten Pasuruan. Hal ini diharapkan menciptakan multiplier effect (efek berganda) yang menggerakkan roda perekonomian desa. Di sektor hilir, proses pengolahan dilakukan di Dapur Satuan Pelayanan (Satpel) yang terstandarisasi, untuk kemudian didistribusikan dengan jadwal yang presisi ke satuan-satuan pendidikan penerima manfaat.



Gambar 1.1 Strategi Arsitektur Ekosistem Badan Gizi Nasional

Sebagaimana diilustrasikan pada bagan di atas, Arsitektur Ekosistem Badan Gizi Nasional (BGN) dirancang dengan pendekatan sistem tertutup (closed-loop system) yang menempatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai agregator sentral. Dalam skema ini, BGN Pusat bertindak sebagai regulator dan penyedia likuiditas anggaran yang disalurkan langsung ke SPPG. Hal ini memastikan bahwa setiap Satuan Pelayanan memiliki otonomi operasional untuk mengelola belanja modal dan belanja pegawai secara akuntabel, tanpa birokrasi yang panjang yang berpotensi menghambat ketepatan waktu penyediaan makanan.

Pada sisi hulu (upstream), ekosistem ini menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi lokal melalui mekanisme rantai pasok pendek (short food supply chain). SPPG tidak diperkenankan beroperasi sebagai entitas yang terisolasi, melainkan wajib bermitra dengan Koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat. Entitas-entitas lokal inilah yang berfungsi sebagai pemasok bahan baku pangan mulai dari beras, sayuran, telur, daging ayam, hingga susu yang diserap langsung dari petani dan peternak di wilayah sekitar SPPG. Mekanisme ini menciptakan siklus ekonomi inklusif (ekonomi sirkular) di mana anggaran negara yang dikucurkan untuk gizi anak sekolah akan berputar kembali ke kantong masyarakat desa, menciptakan multiplier effect yang signifikan bagi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pasuruan.

Di bagian inti operasional, SPPG berfungsi sebagai dapur produksi yang terstandarisasi. Setiap unit pelayanan didesain untuk melayani kuota penerima manfaat dalam radius layanan tertentu, dengan pengawasan ketat dari Tenaga Sarjana Gizi dan ahli kesehatan lingkungan. Proses pengolahan makanan tidak hanya berorientasi pada cita rasa, tetapi juga pada kepatuhan terhadap standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan protokol keamanan pangan (food safety). Di sinilah peran kolaboratif lintas sektor menjadi vital; Dinas Kesehatan memastikan higienitas, sementara Dinas Lingkungan Hidup memantau pengelolaan residu atau limbah produksi agar tidak mencemari lingkungan sekitar.

Selanjutnya pada sisi hilir (downstream), mekanisme distribusi dirancang dengan presisi waktu untuk menjaga kualitas nutrisi saat diterima oleh peserta didik. Armada distribusi bergerak dari SPPG menuju titik-titik layanan (Satuan Pendidikan/Sekolah dan Pesantren) dengan jadwal yang telah disinkronisasi dengan jam istirahat atau jam makan siswa. Melalui arsitektur yang terintegrasi ini, Program Makan Bergizi Gratis bertransformasi dari sekadar program bantuan sosial menjadi instrumen rekayasa sosial (social engineering) yang secara simultan mengatasi dua tantangan besar: pengentasan kerawanan gizi pada generasi muda dan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat perdesaan.

Merespons kompleksitas tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mengambil langkah taktis dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, yang disahkan melalui

Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 100.3.3.2/918/HK/424.013/2025. Pembentukan Satgas ini mengadopsi pendekatan kolaborasi pentahelix dan lintas sektoral. Dinas Pendidikan serta Kementerian Agama berperan dalam pemetaan basis data siswa penerima manfaat. Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas pengawasan higienitas, sanitasi dapur, dan kandungan kalori menu. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang memfasilitasi kesiapan infrastruktur fisik, sementara Dinas Lingkungan Hidup memegang peranan kunci dalam manajemen limbah sisa makanan agar program ini tidak menimbulkan dampak residu lingkungan.

Laporan ini disusun sebagai dokumen induk yang merekam seluruh proses perencanaan, persiapan, dan strategi implementasi tersebut. Di dalamnya termuat analisis mendalam mengenai kesiapan lahan, desain teknis dapur sehat, mitigasi risiko keamanan pangan, hingga skema distribusi yang adaptif terhadap kondisi geografis Kabupaten Pasuruan. Kehadiran laporan ini diharapkan dapat menjadi peta jalan (roadmap) sekaligus instrumen akuntabilitas publik, yang membuktikan keseriusan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengawal program strategis nasional ini demi masa depan generasi penerus di Bumi Sakera.

1.2 Dasar Hukum

Landasan yuridis yang memayungi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pasuruan disusun secara hierarkis sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, yang menempatkan transformasi sosial dan peningkatan kualitas kesehatan gizi sebagai prioritas utama menuju Indonesia Emas 2045;

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang menjadi dasar pembentukan kelembagaan pengelola gizi secara nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, khususnya pada Lampiran halaman 166 poin 5.3.2 Bidang Pendidikan huruf (d) yang mengamanatkan dukungan penganggaran daerah untuk program prioritas nasional;
6. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG);
7. Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kepala dan Wakil Kepala Satuan Pelayanan Gizi Badan Gizi Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 88 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 100.3.3.2/918/HK/424.013/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pasuruan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dikerjakan dengan mengadopsi kerangka berpikir yang komprehensif, mengedepankan pendekatan yang holistik, integratif lintas sektoral, serta berorientasi visioner ke masa depan. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang akuntabel, keberadaan dokumen ini tidak boleh direduksi maknanya hanya sebatas pemenuhan kewajiban administratif atau laporan rutinitas birokrasi semata. Lebih dari itu, laporan ini memiliki nilai substansial sebagai manifestasi tertulis dari komitmen pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan prioritas negara.

Secara fundamental, dokumen ini dirancang dan diposisikan sebagai instrumen strategis Sistem Pengendalian Manajemen (Strategic Management Control

System). Fungsinya adalah sebagai alat navigasi utama bagi para pemangku kepentingan untuk memantau, mengendalikan, dan memastikan bahwa setiap sumber daya yang dialokasikan benar-benar terkonversi menjadi outcome yang berkualitas. Laporan ini bertindak sebagai jembatan penghubung (bridging instrument) yang menyelaraskan visi agung Pemerintah Pusat dalam menyongsong Generasi Emas 2045 dengan dinamika dan realitas operasional yang kompleks di tingkat tapak Kabupaten Pasuruan.

Dengan demikian, laporan ini menjadi bukti empiris kesiapan daerah dalam menerjemahkan kebijakan makro nasional menjadi aksi teknis operasional yang terukur. Berangkat dari paradigma pemikiran tersebut, maka penjabaran secara rinci mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan laporan ini, serta orientasi pelaksanaan program di lapangan, diuraikan sebagai berikut:

- A. Maksud fundamental dari penyusunan laporan dan pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Pasuruan meliputi:
 - a. Manifestasi Tanggung Jawab Negara (State Responsibility) Maksud fundamental dari penyusunan dokumen ini adalah untuk mengejawantahkan kehadiran negara secara nyata dan dirasakan langsung (tangible) dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, khususnya dalam memenuhi hak asasi paling dasar, yaitu hak atas pangan dan gizi yang layak. Laporan ini berdiri sebagai bukti otentik dan historis bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak sekadar menjalankan rutinitas birokrasi, melainkan secara serius menerjemahkan amanat Konstitusi UUD 1945 dan mandat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional ke dalam aksi operasional. Dokumen ini menegaskan pergeseran paradigma pelayanan publik dari sekadar pendekatan karitatif (bantuan sosial) menjadi pendekatan berbasis hak (rights-based approach), di mana pemenuhan gizi siswa diposisikan sebagai investasi negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kualitas generasi penerus bangsa.
 - b. Pedoman Navigasi Implementasi Kebijakan (Strategic Navigation Map) Laporan ini dimaksudkan untuk berfungsi sebagai dokumen induk panduan teknis dan manajerial bagi Satuan Tugas (Satgas) Daerah maupun Tim Pelaksana di tingkat kecamatan dan desa. Mengingat

tingginya kompleksitas tantangan operasional di lapangan mulai dari variabilitas kondisi geografis Kabupaten Pasuruan (wilayah pesisir hingga pegunungan), kerentanan rantai pasok bahan pangan, hingga keragaman karakteristik sosial-budaya di setiap satuan pendidikan maka dokumen ini bertindak sebagai peta navigasi (roadmap) yang krusial. Tujuannya adalah untuk menjaga agar setiap tahapan pelaksanaan program tetap presisi, berada dalam koridor regulasi yang ditetapkan (on the track), serta meminimalisir risiko deviasi kebijakan (policy deviation) yang dapat mendistorsi tujuan mulia program.

- c. Instrumen Orkestrasi Lintas Sektor (Convergence Tool)
Penyelenggaraan Program MBG pada hakikatnya adalah kerja raksasa yang melibatkan banyak pemangku kepentingan (multi-stakeholder). Mulai dari Dinas Pendidikan (data siswa), Dinas Kesehatan (standar gizi & higienitas), Dinas Lingkungan Hidup (manajemen limbah), hingga Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (pemberdayaan suplier lokal). Oleh karena itu, laporan ini dimaksudkan sebagai instrumen untuk mengorkestrasi gerak langkah seluruh sektor tersebut dalam satu komando yang terpadu. Tujuannya adalah menciptakan konvergensi program yang harmonis, mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan (overlapping of authority), serta meruntuhkan ego sektoral yang selama ini kerap menjadi hambatan klasik birokrasi. Laporan ini memastikan bahwa seluruh organ pemerintahan bergerak dalam satu frekuensi yang sama untuk mendukung ekosistem gizi daerah.
- d. Basis Akuntabilitas dan Transparansi Publik (Accountability Framework)
Sebagai program prioritas yang didanai oleh uang rakyat melalui APBN, laporan ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban moral, fiskal, dan administratif yang mutlak kepada publik. Penyajian data yang komprehensif dan rinci mencakup realisasi penggunaan anggaran, progres fisik pembangunan Satuan Pelayanan (dapur umum), hingga validitas data distribusi makanan merupakan manifestasi komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menegakkan prinsip-prinsip Good Governance. Transparansi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik (public trust), menutup celah potensi kebocoran anggaran (zero tolerance for fraud), serta memastikan bahwa setiap

rupiah anggaran negara benar-benar terkonversi menjadi nilai gizi yang masuk ke dalam tubuh anak-anak sekolah.

B. Tujuan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pasuruan dirumuskan secara komprehensif, mencakup dimensi jangka pendek (operasional) hingga jangka panjang (dampak strategis), sebagai berikut:

- a. Tujuan Umum Secara makro, program ini bertujuan untuk membangun pondasi Generasi Emas 2045 yang sehat, cerdas, dan produktif melalui intervensi gizi spesifik yang terstandar, sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah melalui ekosistem pangan yang inklusif dan berkelanjutan.
- b. Tujuan Khusus Secara mikro dan teknis, tujuan program ini dijabarkan ke dalam empat pilar utama:

- i. Pilar Kesehatan dan Perbaikan Gizi

1. Menutup Defisit Kalori dan Nutrisi: Memastikan setiap peserta didik mendapatkan asupan makanan yang memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian, yang terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah-buahan.
 2. Mitigasi Stunting dan Anemia: Menurunkan prevalensi gangguan pertumbuhan (stunting) pada usia sekolah serta menekan angka anemia pada remaja putri, yang merupakan calon ibu di masa depan, guna memutus siklus malnutrisi antar-generasi.
 3. Membentuk Pola Makan Sehat: Mengedukasi lidah dan kebiasaan makan siswa untuk menyukai makanan bergizi seimbang, higienis, dan beragam (B2SA), serta mengurangi ketergantungan pada jajanan yang tidak sehat.

- ii. Pilar Pendidikan dan Kualitas SDM

1. Peningkatan Kognitif dan Konsentrasi: Menyediakan "bahan bakar" biologis bagi otak peserta didik agar mampu berkonsentrasi penuh selama proses belajar mengajar, sehingga daya serap terhadap materi pelajaran meningkat.

2. Mendongkrak Partisipasi Sekolah: Menjadikan program makan siang gratis sebagai insentif tambahan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya, sehingga dapat meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan menekan angka putus sekolah, yang pada akhirnya akan menaikkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Pasuruan.
- iii. Pilar Ekonomi Kerakyatan (Multiplier Effect)
1. Pemberdayaan Rantai Pasok Lokal: Mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyerap bahan baku pangan dari sumber lokal. Hal ini bertujuan memberikan kepastian pasar (captive market) bagi petani padi, peternak ayam/telur, petani sayur, dan pembudidaya ikan di desa-desa sekitar.
 2. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa: Melibatkan Koperasi, BUMDes, dan UMKM sebagai mitra strategis dalam rantai pasok, sehingga nilai tambah ekonomi program ini berputar di dalam wilayah Kabupaten Pasuruan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
- iv. Pilar Infrastruktur dan Lingkungan
1. Standarisasi Dapur Sehat: Mewujudkan infrastruktur Satuan Pelayanan (dapur umum) yang memenuhi standar kelayakan teknis, sanitasi, dan higienitas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan, untuk menjamin keamanan pangan (food safety) dan mencegah kejadian keracunan makanan.
 2. Manajemen Lingkungan Berkelanjutan: Menerapkan sistem pengelolaan limbah sisa makanan (food waste) yang bertanggung jawab, guna memastikan bahwa pelaksanaan program ini tidak menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan di sekitar lokasi dapur maupun sekolah.

1.4 Sasaran

Penetapan sasaran penerima manfaat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pasuruan didasarkan pada prinsip universalitas dan inklusivitas yang mengacu secara ketat pada pendekatan siklus hidup (life-cycle approach). Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyadari sepenuhnya bahwa intervensi gizi tidak dapat lagi dilakukan secara parsial atau terfragmentasi, melainkan harus bersifat holistik dan berkelanjutan (continuum of care). Strategi ini dirancang untuk menyentuh setiap titik kritis dalam fase pertumbuhan biologi manusia, mulai dari fase janin dalam kandungan yang sangat determinan, hingga fase remaja akhir menjelang masuknya individu ke dalam usia produktif.

Filosofi dasar dari penetapan sasaran ini adalah untuk menciptakan sebuah "Jaring Pengaman Gizi" (Nutritional Safety Net) yang kokoh. Dalam perspektif pembangunan daerah, program ini tidak hanya diposisikan sebagai pemenuhan hak dasar pangan semata, tetapi sebagai strategi investasi modal manusia (human capital investment) yang paling fundamental. Tujuannya adalah untuk memutus mata rantai stunting yang selama ini menjadi penghambat utama daya saing daerah, serta mencegah terjadinya lost generation akibat kegagalan tumbuh kembang fisik dan kognitif pada periode emas kehidupan. Kami meyakini bahwa perbaikan gizi pada fase-fase krusial ini akan memberikan rate of return (tingkat pengembalian investasi) ekonomi yang tertinggi bagi masa depan Kabupaten Pasuruan.

Secara spesifik, terperinci, dan berbasis pada data kependudukan terkini, kelompok sasaran prioritas yang berhak mendapatkan intervensi Program Makan Bergizi Gratis ini diklasifikasikan ke dalam beberapa segmen strategis sebagai berikut:

A. Klaster Ibu Hamil dan Ibu Menyusui (Intervensi 1.000 HPK)

Kelompok sasaran ini merupakan garda terdepan dalam upaya pencegahan stunting sejak dini (hulu). Berdasarkan analisis medis, periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dimulai sejak masa konsepsi hingga anak berusia 2 tahun adalah periode emas sekaligus periode paling kritis. Kekurangan gizi pada fase ini bersifat irreversible (tidak dapat diperbaiki).

- a. Ibu Hamil: Sasaran mencakup ibu hamil yang terdata di wilayah kerja Puskesmas dan Posyandu, dengan prioritas pada mereka yang memiliki

risiko Kurang Energi Kronis (KEK). Pemberian makanan bergizi bertujuan memastikan janin mendapatkan asupan mikronutrien yang cukup untuk pembentukan organ vital dan otak.

- b. Ibu Menyusui: Fokus diberikan kepada ibu menyusui eksklusif (0-6 bulan) dan lanjutan (hingga 2 tahun) untuk menjamin kualitas dan kuantitas ASI yang diproduksi, sehingga bayi terhindar dari gizi buruk.

B. Klaster Pendidikan Anak Usia Dini (Fase Golden Age)

Sasaran pada klaster ini meliputi seluruh peserta didik yang terdaftar pada satuan pendidikan:

- a. Taman Kanak-Kanak (TK);
- b. Raudhatul Athfal (RA);
- c. Kelompok Bermain (KB); dan
- d. Satuan PAUD Sejenis (SPS). Urgensi intervensi pada kelompok ini didasarkan pada fakta bahwa perkembangan otak manusia mencapai 80% pada usia balita. Pemberian makan bergizi gratis berupa protein hewani dan susu pada jenjang ini ditujukan untuk menstimulasi perkembangan neuron otak, meningkatkan motorik, serta membentuk kebiasaan makan sehat (healthy eating habit) sejak dini.

C. Klaster Pendidikan Dasar (Fase Pertumbuhan Pesat)

Ini merupakan kelompok sasaran dengan populasi terbesar, mencakup:

- a. Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta; dan
- b. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri dan Swasta. Pada fase usia sekolah dasar (7-12 tahun), anak mengalami lonjakan pertumbuhan fisik dan peningkatan aktivitas fisik yang drastis. Sasaran ini seringkali menghadapi tantangan "kekosongan energi" (hunger gap) di jam sekolah akibat tidak sarapan. Intervensi MBG di jenjang ini difokuskan untuk menjaga stamina fisik, mempertahankan konsentrasi belajar di dalam kelas, dan mengurangi tingkat absensi akibat sakit.

D. Klaster Pendidikan Menengah (Fase Pra-Produktif)

Sasaran ini mencakup remaja pada jenjang:

- a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs); serta
- b. Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA). Pemerintah Kabupaten Pasuruan

memberikan perhatian khusus pada jenjang ini, terutama SMK, mengingat Kabupaten Pasuruan adalah daerah industri. Intervensi gizi pada remaja bertujuan untuk:

- i. Mencegah anemia pada remaja putri (calon ibu masa depan);
- ii. Membentuk postur fisik yang tegap dan kuat sesuai standar kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); dan
- iii. Meningkatkan kecerdasan emosional dan kognitif untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten.

E. Klaster Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Khusus (Inklusivitas)

Sebagai wujud kehadiran negara tanpa diskriminasi (no one left behind), program ini secara eksplisit menasar:

- a. Pondok Pesantren: Santri yang bermukim di asrama pondok pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama. Mengingat kultur pendidikan pesantren yang padat (24 jam), asupan gizi yang layak menjadi krusial untuk mendukung proses menghafal dan belajar kitab.
- b. Sekolah Luar Biasa (SLB): Peserta didik berkebutuhan khusus juga menjadi prioritas utama untuk mendapatkan kesetaraan akses terhadap gizi berkualitas.

Agar penyaluran Program MBG tepat sasaran (by name by address), Pemerintah Kabupaten Pasuruan menerapkan mekanisme integrasi satu data yang ketat dan berlapis. Basis data sasaran tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil konsolidasi lintas sektoral yang dimutakhirkan secara berkala (real-time):

1. Sektor Pendidikan Umum: Menggunakan basis Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Data ini diverifikasi langsung oleh operator sekolah untuk memastikan keaktifan siswa.
2. Sektor Pendidikan Agama: Menggunakan basis Education Management Information System (EMIS) yang dikelola oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, untuk memverifikasi data santri di Madrasah dan Ponpes.
3. Sektor Kesehatan: Menggunakan data kohort Ibu dan Anak serta aplikasi e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dari Dinas Kesehatan untuk memvalidasi sasaran Ibu Hamil dan Menyusui.

Seluruh data sasaran tersebut kemudian dipetakan secara geospasial berdasarkan zonasi layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebagai contoh implementasi, SPPG yang berlokasi di Lapangan Gayam (Kec. Gondang Wetan) dan Desa Tambakrejo telah memiliki data definitif mengenai jumlah mulut yang harus diberi makan (number of mouths to feed) di desa-desa sekitarnya. Dengan pemetaan berbasis zonasi ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat menjamin bahwa makanan akan tiba di tangan sasaran baik di sekolah, pesantren, maupun posyandu dalam kondisi tepat waktu, tepat jumlah, dan tetap hangat.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, terstruktur, dan mudah dipahami mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pasuruan, laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan fondasi pemikiran program, mencakup Latar Belakang yang menjelaskan urgensi intervensi gizi; Dasar Hukum yang menjadi landasan yuridis; Maksud dan Tujuan sebagai arah pengendalian; Sasaran program yang memetakan penerima manfaat; serta Sistematika Penulisan.
- II. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH Bab ini menyajikan potret makro Kabupaten Pasuruan sebagai basis konteks implementasi. Di dalamnya dibahas Kondisi Geografis dan Administratif; Demografi dan Kependudukan; kinerja Ekonomi makro; Ketenagakerjaan; Profil Kemiskinan; tingkat Ketimpangan wilayah; serta capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi indikator outcome jangka panjang.
- III. BAB III KERANGKA KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN Bab ini membedah arsitektur kebijakan yang dibangun, meliputi Landasan Kebijakan Nasional Badan Gizi Nasional; Kebijakan Daerah dan pembentukan Satuan Tugas (Satgas); Struktur Organisasi Pelaksana di lapangan; serta peta peran Pemangku Kepentingan dan mekanisme Sinergitas Lintas Sektor yang dibangun di Kabupaten Pasuruan.
- IV. BAB IV KESIAPAN DAN RENCANA IMPLEMENTASI PROGRAM Bab ini merupakan inti teknis laporan yang memaparkan data faktual lapangan. Terdiri

dari Data Sasaran dan Sebaran Penerima Manfaat secara kuantitatif; Analisis Lokasi dan Ketersediaan Lahan SPPG; Desain dan Standar Bangunan Dapur; Mekanisme Pemorsian dan Jadwal Distribusi yang presisi; Alur Distribusi Logistik; Standar Sanitasi dan Pengolahan Limbah; serta strategi Mitigasi Risiko dan Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB).

- V. BAB V PENUTUP Bab terakhir ini memuat intisari analisis berupa Kesimpulan atas kesiapan daerah, serta Rekomendasi strategis dan solutif untuk perbaikan pelaksanaan program di masa mendatang.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Keberhasilan implementasi kebijakan strategis nasional, khususnya yang bersifat masif, berisiko tinggi, dan berorientasi jangka panjang pada pembangunan manusia seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sangat bergantung pada akurasi dan ketajaman pemahaman terhadap lanskap wilayah yang menjadi arena intervensi. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Kabupaten Pasuruan tidak boleh dipandang secara sederhana hanya sebagai ruang administratif pemerintahan semata. Lebih dari itu, wilayah ini harus dibaca sebagai sebuah ekosistem logistik yang kompleks, sebuah jejaring rantai pasok (supply chain network) yang dinamis, serta sebuah struktur sosial-ekonomi yang memiliki karakteristik unik di setiap lapisannya.

Oleh karena itu, sebelum melangkah lebih jauh pada desain teknis operasional seperti penentuan titik lokasi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperlukan sebuah proses diagnostik yang menyeluruh (comprehensive diagnostic assessment) mengenai kondisi eksisting daerah. Pemetaan ini merupakan prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) guna memastikan bahwa strategi distribusi pangan yang disusun mampu menjawab tantangan disparitas wilayah, memitigasi risiko pembusukan bahan pangan (*perishability risks*) akibat kendala jarak, dan memastikan intervensi gizi benar-benar mendarat tepat sasaran di mulut siswa penerima manfaat.

Bab ini didedikasikan secara khusus untuk mengurai dan membedah profil wilayah Kabupaten Pasuruan secara mendalam (*in-depth analysis*) dari berbagai dimensi strategis yang saling berkorelasi:

1. Dimensi Geografis dan Geospasial: Analisis ini menjadi determinan utama dalam manajemen logistik. Kabupaten Pasuruan memiliki topografi yang sangat kontras, mulai dari wilayah pesisir pantai utara yang panas hingga wilayah pegunungan (Tengger dan Arjuno-Welirang) yang memiliki aksesibilitas menantang. Variabel ini sangat menentukan zonasi klasterisasi Satuan Pelayanan, pemilihan moda transportasi, hingga manajemen suhu makanan (*thermal management*) agar tetap aman dikonsumsi saat tiba di sekolah terpencil (daerah remote).

2. Dimensi Demografi dan Human Capital: Data kependudukan tidak hanya disajikan sebagai statistik jumlah jiwa, melainkan dianalisis sebagai basis data sasaran (beneficiary database). Bab ini akan memetakan sebaran densitas populasi siswa dan santri, memproyeksikan pertumbuhan jumlah penerima manfaat, serta mengidentifikasi kantong-kantong populasi rentan. Hal ini krusial untuk mencegah terjadinya error of inclusion (salah sasaran) maupun error of exclusion (kelompok yang berhak namun tidak terdata).
3. Dimensi Ekonomi, Pertanian, dan Rantai Pasok Lokal: Analisis ini memotret kapasitas "Sisi Penawaran" (Supply Side) daerah. Kami akan membedah potensi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan Kabupaten Pasuruan sebagai tulang punggung penyedia bahan baku. Pemahaman ini penting untuk memastikan bahwa Program MBG tidak hanya menjadi beban fiskal, tetapi justru menjadi stimulus ekonomi (economic multiplier) yang menyerap produk petani lokal, menghidupkan UMKM, dan menciptakan ekonomi sirkular yang berkelanjutan.
4. Dimensi Kesejahteraan Sosial (Kemiskinan): Menjadi *raison d'être* (alasan keberadaan) dan landasan moral dari program ini. Analisis terhadap peta kemiskinan dan ketimpangan wilayah akan menjadi panduan dalam menentukan prioritas intervensi, memastikan bahwa kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan (the bottom 40%).

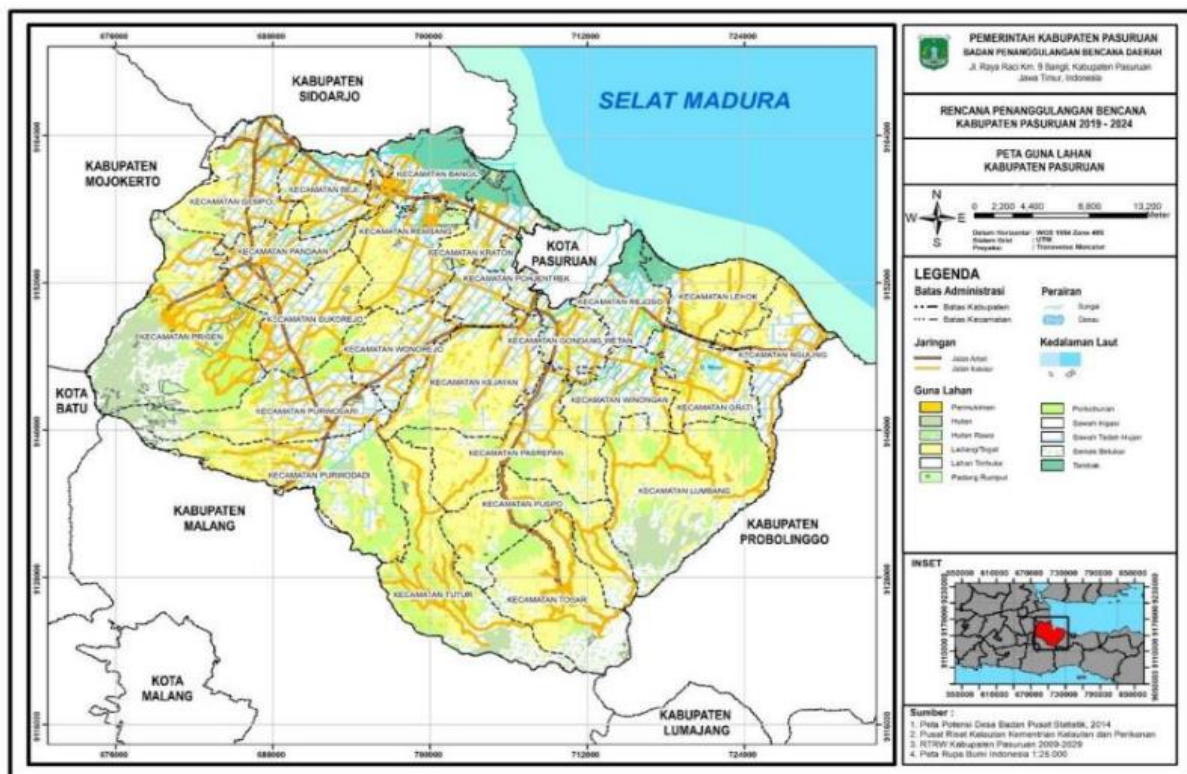
Dengan demikian, pemahaman yang utuh dan holistik terhadap variabel-variabel makro dan mikro ini akan menjadi fondasi logis yang kokoh bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Data-data yang tersaji dalam bab ini bukan sekadar pelengkap laporan, melainkan basis argumen dalam merumuskan kebijakan operasional yang presisi, tepat waktu (on-time delivery), efisien secara anggaran, dan efektif secara dampak (impactful).

2.1 Kondisi Geografis dan Administratif

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu entitas wilayah strategis di Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik fisiografis yang unik dan beragam, membentang dari kawasan pesisir di utara hingga dataran tinggi pegunungan di selatan. Secara astronomis, wilayah Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat 7°32'42.14" sampai

dengan $7^{\circ}57'24.32''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}34'29.31''$ sampai dengan $113^{\circ}06'0.29''$ Bujur Timur. Posisi geografis ini menempatkan Kabupaten Pasuruan pada jalur konektivitas regional yang vital, namun sekaligus menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemerataan aksesibilitas layanan publik, khususnya distribusi logistik pangan ke sekolah-sekolah di wilayah terluar.

Ditinjau dari aspek teritorial, Kabupaten Pasuruan memiliki batas-batas administratif yang bersinggungan langsung dengan beberapa pusat pertumbuhan ekonomi utama di Jawa Timur. Di sebelah Utara, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, dan garis pantai Selat Madura yang menjadi basis ekonomi maritim. Di sebelah Timur, berbatasan langsung dengan Kabupaten Probolinggo. Di sebelah Selatan, berbatasan dengan wilayah dataran tinggi Kabupaten Malang, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu. Konfigurasi perbatasan ini menegaskan posisi Kabupaten Pasuruan sebagai wilayah penyangga (hinterland) sekaligus pusat aktivitas yang dinamis.



Gambar 2.1 Peta Administratif Wilayah Kabupaten Pasuruan

Visualisasi geospasial peta administrasi yang tersaji pada Gambar 2.1 di atas memperlihatkan secara komprehensif konfigurasi kewilayahan Kabupaten Pasuruan yang unik sekaligus menantang. Wilayah ini memiliki rentang kendali administratif yang cukup lebar dengan karakteristik topografi yang sangat kontras (topographical dichotomy). Peta tersebut memvisualisasikan dengan jelas pola sebaran wilayah yang memanjang, menciptakan garis demarkasi alami antara klaster kecamatan di dataran rendah pesisir utara atau "Jalur Pantura" (seperti Kecamatan Lekok, Nguling, Rejoso, Kraton) dengan klaster kecamatan di dataran tinggi pegunungan selatan yang merupakan kaki Gunung Bromo dan Arjuno-Welirang (seperti Kecamatan Tosari, Tukur, Puspo, hingga Prigen).

Dalam konteks operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), peta administrasi ini memberikan perspektif teknis yang vital mengenai tantangan manajemen logistik, khususnya terkait variabel waktu tempuh (lead time) dan jarak tempuh (mileage). Struktur wilayah yang heterogen ini menegaskan bahwa armada distribusi pangan akan menghadapi medan yang beragam; mulai dari kemacetan lalu lintas industri di jalur utara hingga tanjakan curam dan jalan berkelok di wilayah selatan. Bagi sekolah-sekolah yang terletak di titik terjun ("remote area") seperti di ujung timur perbatasan atau di puncak dataran tinggi, kepastian menerima paket makanan dalam kondisi hangat dan susu segar yang aman dikonsumsi adalah tantangan logistik yang berat.

Risiko utama yang diidentifikasi dari peta sebaran ini adalah potensi penurunan suhu makanan (temperature abuse) selama proses pengiriman. Dalam standar keamanan pangan (Food Safety Standard), makanan matang yang berada dalam perjalanan terlalu lama berisiko memasuki "Zona Bahaya" (Danger Zone suhu 5°C - 60°C), di mana bakteri dapat berkembang biak dengan cepat. Jarak fisik yang terlihat di peta harus dikonversi menjadi satuan waktu. Jika sebuah dapur produksi (SPPG) diletakkan terlalu jauh dari sekolah sasaran, maka risiko degradasi kualitas nutrisi dan pembusukan bahan pangan (perishable goods) akan meningkat secara eksponensial.

Oleh karena itu, interpretasi terhadap peta sebaran administratif ini memvalidasi secara ilmiah urgensi penerapan strategi Desentralisasi Dapur Produksi. Model sentralisasi (satu dapur besar untuk satu kabupaten) dipastikan akan gagal (infeasible) diterapkan di Kabupaten Pasuruan. Sebagai gantinya, diperlukan

penyebaran lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendekat secara agresif ke klaster sekolah (sistem rayon/sub-rayon). Strategi ini bertujuan untuk memperkecil radius layanan (catchment area), sehingga armada distribusi mampu memenuhi Standar Tingkat Layanan (Service Level Agreement) yang ketat, yaitu durasi pengiriman maksimal 2 jam dari masakan matang hingga siap santap (from cook to consume). Dengan mendekatkan titik produksi ke titik konsumsi, kita memangkas waktu distribusi, menjamin kesegaran makanan, dan meminimalisir biaya transportasi jangka panjang.

Berdasarkan data administratif yang tercatat, luas wilayah daratan Kabupaten Pasuruan mencapai 149.332 Ha. Wilayah yang sangat ekspansif ini secara administratif terbagi ke dalam 24 Kecamatan dan 365 Desa/Kelurahan. Besarnya cakupan wilayah administrasi ini menjadi variabel determinan yang sangat krusial dalam perencanaan operasional program. Dengan sebaran sekolah sasaran yang tidak terkonsentrasi di satu titik melainkan tersebar di berbagai pelosok desa mulai dari kawasan pesisir yang padat hingga sekolah-sekolah kecil di lereng pegunungan, maka mekanisme distribusi makanan siap saji seringkali terkendala oleh faktor jarak tempuh dan kondisi medan jalan.

Kondisi geografis Kabupaten Pasuruan yang luas, memanjang, dan memiliki karakteristik permukiman yang terpencar (scattered settlement pattern) memberikan landasan argumentasi yang kuat, logis, dan tak terbantahkan bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menolak model sentralisasi dan beralih mengadopsi model Kemitraan Rantai Pasok Lokal (Hyper-local Supply Chain Partnership). Pilihan strategi ini bukan sekadar preferensi teknis semata, melainkan sebuah solusi teknokratis yang dirancang untuk mengatasi hambatan geografis (spatial barrier) yang selama ini menjadi musuh utama efisiensi distribusi di wilayah seluas Pasuruan.

Dalam kerangka manajemen logistik modern, model ini menerapkan konsep Rantai Pasok Pangan Pendek (Short Food Supply Chain). Dengan memberdayakan pemasok lokal (Gabungan Kelompok Tani/Gapoktan, Peternak, dan BUMDes) dan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap wilayah strategis kecamatan, kita secara efektif memangkas mata rantai distribusi. Armada logistik tidak perlu menempuh jarak ratusan kilometer yang memakan biaya bahan bakar tinggi dan meningkatkan emisi karbon. Penghematan biaya transportasi ini menciptakan

Efisiensi Alokatif; dana yang seharusnya habis di jalan untuk bensin, dapat dialihkan untuk meningkatkan kualitas dan porsi bahan makanan di piring siswa.

Lebih jauh, pendekatan desentralisasi ini adalah wujud nyata dari Demokratisasi Akses Gizi. Negara memfasilitasi pembangunan dapur di dekat kluster sekolah untuk menjamin standar kualitas yang seragam. Tujuannya adalah agar disparitas kualitas makanan akibat faktor lokasi dapat dieliminasi sepenuhnya. Siswa yang bersekolah di wilayah pegunungan terpencil berhak menikmati makanan yang sama hangat, sama segar, dan sama higienisnya dengan siswa yang bersekolah di pusat kota Bangil. Tidak boleh ada degradasi mutu makanan hanya karena faktor jarak tempuh. Inilah esensi keadilan sosial dalam pelayanan publik.

Dalam konteks operasionalisasi tahap awal, pemahaman mendalam terhadap struktur wilayah ini juga melandasi keputusan strategis dalam penentuan titik lokasi prioritas pembangunan SPPG. Pemanfaatan lahan aset daerah yang tersebar di berbagai kecamatan bukan dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan analisis konektivitas. Titik-titik ini dipilih karena berfungsi vital sebagai "Hub Logistik" atau simpul konektivitas. Setiap SPPG dirancang memiliki fungsi ganda (dual function):

1. Sebagai Agregator Hulu: Menjadi titik kumpul yang mudah dijangkau oleh petani dan peternak lokal untuk menyetorkan bahan baku segar setiap pagi, sehingga meminimalkan biaya angkut petani.
2. Sebagai Distributor Hilir: Menjadi titik start armada distribusi ke sekolah-sekolah penerima manfaat dengan radius tempuh yang pendek dan cepat.

Dengan menempatkan SPPG sebagai "Hub" di tengah-tengah "Spoke" (sekolah dan petani), kita menciptakan ekosistem logistik yang responsif. Hal ini memudahkan masuknya suplai bahan baku segar dari desa penyangga, sekaligus mengamankan ketepatan waktu pengiriman (on-time performance) ke sekolah-sekolah.

Untuk memberikan gambaran yang lebih terperinci, terukur, dan akurat mengenai skala tantangan dan luas cakupan wilayah yang harus dilayani (service coverage area) oleh program ini, berikut disajikan data luas daerah dirinci menurut kecamatan. Data ini menjadi basis perhitungan beban kerja logistik per kecamatan:

Tabel 2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasuruan

No	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km2)	Presentase (%)
		Desa	Kelurahan		
1	Purwodadi	13	-	102,46	6,95
2	Tutur	12	-	86,30	5,85
3	Puspo	7	-	58,35	3,96
4	Lumbang	12	-	125,55	8,52
5	Pasrepan	17	-	89,95	6,10
6	Kejayan	24	1	79,15	5,37
7	Wonorejo	15	-	47,30	3,21
8	Purwosari	14	1	59,87	4,06
9	Sukorejo	19	-	58,18	3,95
10	Prigen	9	-	121,90	8,27
11	Pandaan	14	4	43,27	2,94
12	Gempol	15	-	64,92	4,40
13	Beji	12	2	39,90	2,71
14	Bangil	4	11	44,60	3,03
15	Rembang	17	-	42,52	2,88
16	Kraton	25	-	50,75	3,44
17	Pohjentrek	11	3	11,88	0,81
18	Gondang Wetan	19	1	26,25	1,78
19	Winongan	18	-	45,97	3,12
20	Grati	14	1	50,78	3,45
21	Nguling	15	-	42,60	2,89
22	Lekok	11	-	46,57	3,16
23	Rejoso	16	-	37,00	2,51
24	Tosari	8	-	98,00	6,65
Kabupaten Pasuruan		341	24	1.474,02	1 474,02

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan 2022,
Badan Pertanahan Nasional 2022 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan
2022

Analisis terhadap data kewilayahan ini memberikan kesimpulan awal bahwa tantangan pemenuhan gizi siswa di Kabupaten Pasuruan tidak hanya berakar pada masalah daya beli, tetapi juga berkelindan dengan masalah logistik kewilayahan. Mengingat menu MBG mencakup susu segar yang perishable (mudah rusak) dan sayur matang yang memiliki batas waktu konsumsi, faktor geografi menjadi penentu kualitas. Oleh karena itu, pendekatan desentralisasi layanan dan penguatan infrastruktur SPPG di titik-titik strategis kecamatan merupakan langkah intervensi yang paling rasional dan efektif untuk menjangkau sasaran program yang tersebar di 149.332 Ha wilayah Kabupaten Pasuruan.

2.2 Demografi dan Kependudukan

Penduduk memegang peran ganda yang sangat strategis dan sentral dalam ekosistem pembangunan daerah; mereka bertindak sebagai subjek (motor penggerak) sekaligus objek (penerima manfaat) utama dari seluruh proses pembangunan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam, granular, dan komprehensif mengenai struktur, komposisi, serta distribusi penduduk menjadi prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) dalam menyusun perencanaan layanan dasar yang efektif. Tanpa data demografi yang akurat, kebijakan publik berisiko mengalami disorientasi sasaran. Analisis demografi di Kabupaten Pasuruan pada bab ini tidak hanya berhenti pada penghitungan kuantitatif jumlah jiwa semata, melainkan melangkah lebih jauh untuk membedah kualitas, stratifikasi usia, dan sebaran spasial calon penerima manfaat Program Strategis Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dinamika kependudukan adalah variabel yang sangat cair dan fluktuatif, dipengaruhi oleh tiga komponen utama: fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan penduduk masuk/keluar). Ketiga komponen ini secara simultan membentuk struktur umur penduduk yang memberikan gambaran riil mengenai besarnya beban tanggungan daerah (*dependency ratio*). Analisis terhadap rasio ketergantungan ini sangat krusial karena memetakan potensi "Bonus Demografi" sebuah fenomena di mana proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk non-produktif.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa bonus demografi ibarat "pedang bermata dua". Jika dikelola dengan intervensi gizi dan pendidikan yang tepat, bonus ini akan

menciptakan generasi produktif yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, jika isu gizi kronis (stunting) dan akses pendidikan diabaikan, bonus ini dapat berbalik menjadi "Bencana Demografi". Anak-anak yang tumbuh dengan kondisi kurang gizi hari ini akan menjadi angkatan kerja dengan produktivitas rendah di masa depan, yang justru akan membebani anggaran negara dan jaminan sosial. Di sinilah Program MBG hadir sebagai instrumen investasi strategis untuk mengonversi potensi populasi tersebut menjadi aset modal manusia (human capital) yang berkualitas tinggi.

Berdasarkan data kependudukan agregat yang dihimpun dan divalidasi selama periode empat tahun terakhir (2020-2023), Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pertumbuhan penduduk yang konsisten positif. Fenomena kenaikan jumlah penduduk ini berimplikasi langsung dan linier terhadap peningkatan kebutuhan pangan (demand side) dan kapasitas layanan pendidikan. Setiap penambahan angka kelahiran artinya ada penambahan calon siswa baru yang membutuhkan asupan gizi di sekolah beberapa tahun mendatang.

Pada tahun 2023, data administrasi kependudukan mencatat bahwa jumlah total penduduk Kabupaten Pasuruan telah menembus angka 1.634.022 jiwa. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan indikator bahwa Kabupaten Pasuruan memiliki basis massa yang sangat besar. Besarnya populasi ini mengukuhkan posisi Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu lumbung SDM terbesar di Provinsi Jawa Timur.

Implikasi teknis dari besarnya populasi ini terhadap Program MBG sangat signifikan. Jumlah penduduk yang besar secara inheren menuntut kesiapan manajemen logistik pangan yang masif. Pemerintah daerah dituntut untuk menyiapkan rantai pasok yang mampu melayani ratusan ribu mulut setiap harinya, memastikan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan, serta memitigasi risiko lonjakan permintaan. Data populasi ini menjadi basis perhitungan volume beras, jumlah butir telur, dan liter susu yang harus diproduksi oleh sektor pertanian lokal, sehingga program ini dapat berjalan tanpa gangguan pasokan (zero disruption).

Untuk melihat tren pertumbuhan penduduk secara lebih rinci, mendeteksi pola perkembangannya, dan membedah komposisinya dari tahun ke tahun sebagai dasar

proyeksi kebutuhan anggaran MBG di masa depan, berikut disajikan data perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan:

Tabel 2.2 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk di Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.605.969	1.615.420	1.619.035	1.634.022
	➤ Laki-Laki	803.730	808.237	809.968	814.762
	➤ Perempuan	802.239	807.183	809.067	819.260
2	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	1.089,52	1.095,93	1.098,38	1.108,55
3	Sex Ratio (L/P) (%)	100,19	100,13	100,11	99,45
4	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur				
	0 - 14 tahun (%)	21,33	22,30	23,21	22,95
	15 - 64 tahun (%)	71,74	70,79	69,94	69,67
	Di atas 65 tahun (%)	6,94	6,92	6,85	7,38

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Analisis mendalam terhadap tabel kependudukan di atas menyingkap fenomena menarik terkait pergeseran pada komposisi jenis kelamin (sex ratio). Data mutakhir tahun 2023 mencatat bahwa populasi penduduk perempuan (819.260 jiwa) kini sedikit lebih dominan dibandingkan penduduk laki-laki (814.762 jiwa), dengan Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) berada di angka 99,45.

Secara statistik, angka ini bermakna bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan, terdapat sekitar 99 penduduk laki-laki.

Meskipun terlihat sebagai selisih angka yang tipis, data ini memiliki implikasi teknis yang fundamental dalam Perencanaan Standar Gizi dan Menu Makanan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyadari bahwa kebutuhan biologis antara siswa laki-laki dan perempuan tidaklah seragam.

Siswa Perempuan (Remaja Putri): Memerlukan atensi khusus pada asupan zat besi (Fe) dan asam folat. Dominasi jumlah perempuan ini menjadi peringatan dini untuk mencegah prevalensi Anemia Defisiensi Besi (ADB) yang sering menyerang

remaja putri akibat siklus menstruasi. Jika tidak diintervensi melalui menu MBG yang kaya protein hewani dan sayuran hijau, remaja putri yang anemia ini berisiko melahirkan generasi stunting di masa depan.

Siswa Laki-laki: Cenderung memiliki laju metabolisme basal yang lebih tinggi dan aktivitas fisik yang lebih berat, sehingga membutuhkan asupan kalori dan protein pembentuk otot yang memadai.

Oleh karena itu, Program MBG tidak bisa menerapkan pendekatan "satu ukuran untuk semua" (one size fits all) secara kaku, melainkan harus mengadopsi prinsip Anggaran Responsif Gender (Gender-Responsive Budgeting) dalam penyusunan siklus menu hariannya.

Lebih jauh, aspek demografi yang paling relevan dan menjadi tulang punggung urgensi penyelenggaraan MBG adalah struktur umur penduduk.

Analisis terhadap piramida penduduk menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan sedang berada di puncak Bonus Demografi. Hal ini ditandai dengan dominasi kelompok umur produktif (15-64 tahun) yang mencapai 69,67%, sementara penduduk usia muda/sekolah (0-14 tahun) berada di angka 22,95%.

Angka 22,95% ini yang merepresentasikan ratusan ribu anak bukan sekadar statistik beban tanggungan, melainkan Cadangan Modal Manusia (Human Capital Reserve). Besarnya proporsi penduduk usia muda ini memberikan peta jalan (roadmap) yang jelas bagi pemerintah daerah:

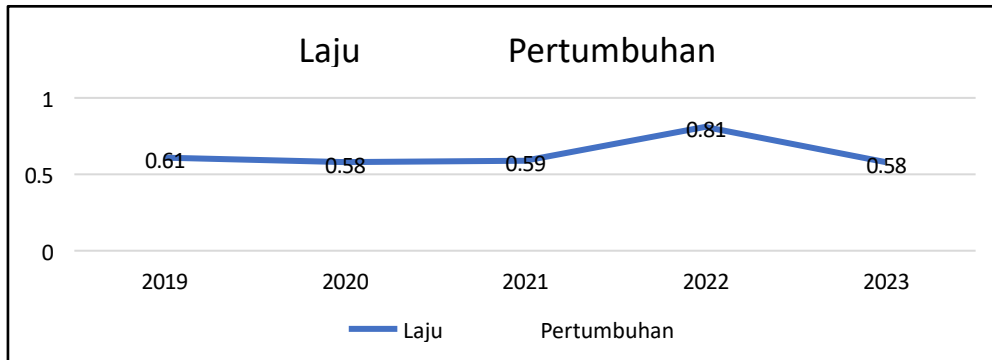
Skala Target Pasar: Angka ini mengonfirmasi bahwa "klien" atau penerima manfaat langsung dari layanan MBG sangat masif. Ini menuntut kesiapan kapasitas produksi dapur yang besar.

Jendela Peluang (Window of Opportunity): Kita memiliki waktu terbatas untuk mengintervensi kelompok 22,95% ini sebelum mereka masuk ke pasar kerja.

Intervensi negara melalui penyediaan makan bergizi di sekolah menjadi instrumen vital untuk memastikan kelompok usia muda ini tumbuh sehat, memiliki kapasitas kognitif (IQ) yang tinggi, dan fisik yang prima. Tanpa asupan gizi yang cukup, besarnya jumlah anak muda ini justru akan menjadi beban demografi. Mereka berisiko

menjadi angkatan kerja yang tidak kompetitif, sakit-sakitan, dan berpendapatan rendah.

Melalui MBG, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berupaya keras mencegah terjadinya "Generasi Hilang" (Lost Generation). Kami ingin memastikan bahwa transisi demografi ini berujung pada terciptanya Generasi Emas yang siap menopang perekonomian daerah, bukan sebaliknya..



Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka

Visualisasi grafik laju pertumbuhan penduduk di atas bukan sekadar deretan angka historis, melainkan sebuah instrumen prediktif yang menegaskan bahwa Kabupaten Pasuruan memiliki basis populasi anak sekolah yang sangat dinamis dan terus bertumbuh.

Tren positif ini mengirimkan sinyal kewaspadaan bagi tim perencana. Stabilitas pertumbuhan penduduk usia sekolah ini menjadi basis data utama (baseline) dalam Perencanaan Kapasitas Produksi (Capacity Planning) di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Implikasi teknisnya adalah infrastruktur dapur umum tidak boleh didesain dengan pendekatan statis atau kaku. Sebaliknya, arsitektur operasional SPPG wajib mengadopsi prinsip Scalable Capacity Design (Desain Kapasitas Terukur yang Bisa Ditingkatkan). Fasilitas dapur harus memiliki fleksibilitas ruang dan peralatan untuk menaikkan volume produksi (ramp-up) sewaktu-waktu.

Hal ini krusial untuk mengantisipasi lonjakan jumlah siswa baru pada setiap momentum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran baru. Dengan desain yang elastis ini, pemerintah daerah menjamin bahwa tidak akan ada satu pun

anak yang luput dari layanan atau tidak kebagian jatah makan siang hanya karena alasan keterbatasan kuota produksi ("over-capacity").

Bergerak pada variabel demografi selanjutnya, analisis mengenai Tingkat Kepadatan Penduduk (Population Density) menjadi variabel kunci yang sangat determinan dalam manajemen rantai pasok.

Dalam konteks logistik pangan, kepadatan penduduk bukan sekadar angka statistik jiwa per kilometer persegi, melainkan variabel independen yang memiliki korelasi positif yang sangat kuat dengan efisiensi rute distribusi logistik (distribution route efficiency).

Fenomena peningkatan jumlah penduduk yang tidak selalu diiringi dengan perluasan wilayah administrasi menyebabkan terjadinya konsentrasi hunian atau aglomerasi yang semakin padat di titik-titik tertentu. Hal ini menciptakan dua tipologi wilayah layanan yang membutuhkan pendekatan distribusi berbeda:

1. Wilayah Densitas Tinggi (Perkotaan/Industri): Di wilayah dengan kepadatan tinggi (seperti Bangil, Pandaan, Gempol), lokasi sekolah cenderung berdekatan satu sama lain. Kondisi ini menguntungkan secara logistik karena menciptakan Economies of Density. Armada distribusi dapat menerapkan metode pengiriman Milk Run (satu truk mengantar ke banyak sekolah dalam satu rute pendek) dengan biaya per unit yang sangat efisien dan waktu tempuh yang minim.
2. Wilayah Densitas Rendah (Pegunungan/Pesisir Ujung): Sebaliknya, di wilayah dengan kepadatan rendah, jarak antar-sekolah cenderung berjauhan (terpencar). Tantangan di sini adalah biaya distribusi per unit yang tinggi (high cost per meal delivered) dan risiko keterlambatan.

Oleh karena itu, pemetaan kepadatan penduduk ini menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menyusun Optimasi Rute Logistik (Route Optimization).

Kita dapat memetakan "Jalur Merah" (padat dan cepat) serta "Jalur Biru" (jarang dan butuh armada khusus), memastikan armada yang dikerahkan sesuai dengan medan dan karakteristik kepadatan wilayahnya. Pemahaman ini

menghindarkan program dari inefisiensi bahan bakar dan menjamin makanan tiba tepat waktu di bel sekolah berbunyi.

Tabel 2.3 Kepadatan Penduduk

No	Tahun	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	2019	1.080,09
2	2020	1.089,52
3	2021	1.095,93
4	2022	1.098,38
5	2023	1.108,55

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Data kepadatan penduduk agregat yang telah mencapai angka 1.108,55 jiwa/km² pada tahun 2023 bukan sekadar indikator statistik demografi semata, melainkan sebuah variabel kunci yang memberikan implikasi teknis-operasional yang sangat signifikan terhadap desain model distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Angka ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Pasuruan memiliki karakteristik wilayah semi-urban yang unik, yang menuntut pendekatan manajemen rantai pasok yang fleksibel dan spesifik-lokasi (site-specific).

Dalam menerjemahkan data kepadatan ini ke dalam strategi operasional di lapangan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu menerapkan Pendekatan Hibrida yang membedakan perlakuan berdasarkan tipologi wilayah:

1. Strategi Wilayah Densitas Tinggi (High Density Zone): Di wilayah dengan konsentrasi penduduk padat (seperti kawasan industri dan perkotaan), penerapan model SPPG Terpusat (Central Kitchen) atau Dapur Umum Skala Besar adalah pilihan yang paling rasional dan efisien secara ekonomi.

Dengan densitas siswa yang tinggi dalam satu radius wilayah yang sempit, dapur terpusat dapat memaksimalkan Skala Ekonomi (Economies of Scale). Satu dapur besar dapat memproduksi ribuan porsi sekaligus dengan biaya overhead yang rendah, lalu mendistribusikannya ke puluhan sekolah di sekitarnya dengan waktu tempuh yang sangat singkat. Model ini meminimalisir biaya distribusi per unit (cost per delivery) secara drastis.

2. Strategi Wilayah Densitas Rendah (Low Density Zone): Sebaliknya, di wilayah dengan kepadatan penduduk rendah dan permukiman yang menyebar (sprawl), model sentralisasi menjadi tidak relevan dan berisiko tinggi. Jarak antar-sekolah yang berjauhan akan membengkakkan biaya transportasi dan meningkatkan risiko kerusakan makanan di jalan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi distribusi yang lebih adaptif, yakni Desentralisasi Dapur (Dapur Satelit/Komunitas). SPPG dibangun dalam skala yang lebih kecil namun dengan jumlah yang lebih banyak dan tersebar mendekat ke titik-titik sekolah, guna memastikan kesegaran makanan tetap terjaga.

Lebih jauh, analisis mendalam menunjukkan bahwa distribusi atau persebaran penduduk di Kabupaten Pasuruan tidaklah merata (asimetris), mencerminkan adanya disparitas antar-wilayah yang cukup mencolok. Secara administratif, penduduk tersebar di 24 Kecamatan dengan karakteristik sosiologis dan topografis yang sangat kontras:

1. Klaster Industri dan Perkotaan: Wilayah seperti Gempol, Pandaan, dan Bangil menjadi magnet aglomerasi penduduk karena ketersediaan lapangan kerja. Di sini, tantangan distribusi MBG bukan pada jarak, melainkan pada volume produksi yang masif dan kemacetan lalu lintas pada jam sibuk.
2. Klaster Pegunungan dan Agraris: Wilayah seperti Tosari, Lumbang, dan Puspo memiliki populasi yang lebih jarang dengan kontur wilayah yang menantang. Di sini, tantangan utamanya adalah aksesibilitas dan waktu tempuh.

Ketimpangan distribusi ini menegaskan bahwa manajemen MBG tidak bisa menggunakan pendekatan "Satu Ukuran untuk Semua" (One Size Fits All).

Pemahaman terhadap pola sebaran penduduk di 24 kecamatan ini menjadi landasan bagi penyusunan Peta Zonasi Layanan Logistik, yang memastikan bahwa siswa di daerah pegunungan yang sepi penduduk tetap mendapatkan hak layanan gizi yang sama prima-nya dengan siswa di pusat keramaian kota.

Tabel 2.4 Persebaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Purwodadi	69.171	70.015	70.438	70.601	71.345
2	Tutur	52.615	53.743	53.887	53.830	55.107
3	Puspo	26.851	27.722	27.771	27.778	28.164
4	Tosari	34.754	18.799	18.818	18.837	35.879
5	Lumbang	50.778	35.174	35.385	35.464	53.259
6	Pasrepan	64.720	52.396	52.594	52.596	67.235
7	Kejayan	58.847	65.374	65.603	65.589	61.112
8	Wonorejo	84.017	59.864	60.186	60.286	86.266
9	Purwosari	86.746	84.137	84.706	84.962	88.671
10	Prigen	86.967	87.227	87.649	87.745	88.839
11	Sukorejo	110.105	87.477	88.069	88.336	112.299
12	Pandaan	128.871	111.062	111.563	111.651	130.809
13	Gempol	86.474	129.990	130.596	130.719	89.930
14	Beji	84.754	87.022	87.864	88.385	84.241
15	Bangil	65.373	83.307	83.671	83.724	68.840
16	Rembang	86.380	66.711	67.294	67.631	88.535
17	Kraton	30.804	88.525	88.912	88.969	31.436
18	Pohjentrek	56.062	31.296	31.581	31.751	57.339
19	Gondang Wetan	45.137	56.264	56.589	56.705	45.565
20	Rejoso	80.098	46.766	47.036	47.132	80.858
21	Winongan	61.462	44.287	44.569	44.686	63.091
22	Grati	75.279	78.930	79.368	79.512	78.286
23	Lekok	47.368	77.514	78.176	78.551	48.366
24	Nguling	18.454	62.367	63.095	63.595	18.550
Total		1.592.078	1.605.969	1.615.420	1.619.035	1.634.022

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2023**Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)*

Berdasarkan bedah data pada tabel persebaran penduduk di atas, terlihat adanya fenomena konsentrasi penduduk yang sangat mencolok (population agglomeration). Pusat gravitasi populasi secara faktual berada di kantong-kantong kawasan industri utama dan koridor ekonomi, seperti Kecamatan Pandaan (dengan populasi masif 130.809 jiwa), Sukorejo, dan Gempol. Wilayah-wilayah ini memiliki karakteristik urban dengan densitas hunian yang rapat.

Di sisi spektrum yang lain, kontras tajam terlihat pada kecamatan-kecamatan yang terletak di gugusan dataran tinggi atau wilayah pegunungan, seperti Kecamatan Tosari (35.879 jiwa), Puspo, dan Lumbang. Wilayah ini memiliki karakteristik populasi yang jauh lebih sedikit dengan pola permukiman yang menyebar (scattered), mengikuti kontur topografi pegunungan yang ekstrem.

Implikasi Strategis terhadap Desain Operasional Program MBG Ketimpangan sebaran penduduk yang asimetris ini memberikan landasan aksiomatis bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam merancang arsitektur logistik program. Fakta ini menegaskan bahwa pendekatan "Satu Ukuran untuk Semua" (One Size Fits All) adalah sebuah kekeliruan fatal jika dipaksakan dalam manajemen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penerapan satu model yang seragam justru akan menciptakan inefisiensi anggaran di satu sisi, dan kegagalan layanan di sisi lain.

Oleh karena itu, strategi operasional harus dibedah menggunakan pendekatan Manajemen Spesifik Lokasi (Site-Specific Management):

1. Strategi Klaster Wilayah Padat (Pandaan, Bangil, Gempol) Wilayah ini dikategorikan sebagai "Zona Merah" dalam hal volume permintaan. Strategi yang diterapkan adalah efisiensi skala besar.

Model Operasional: Membutuhkan pembangunan SPPG dengan kapasitas produksi Volume Tinggi (High-Volume Production Kitchen). Fasilitas ini dirancang layaknya pabrik makanan yang mampu memproduksi ribuan hingga puluhan ribu porsi per hari dengan standar industrial.

Logistik: Meskipun volumenya besar, tantangan distribusinya relatif rendah karena radius antar-sekolah sangat dekat dan akses jalan yang lebar/mulus. Model distribusi dapat menggunakan armada truk boks besar dengan rute multi-drop yang efisien. Fokus utamanya adalah kecepatan produksi (throughput) untuk melayani populasi siswa yang sangat padat.

2. Strategi Klaster Wilayah Jarang Penduduk (Tosari, Puspo, Lumbang) Wilayah ini dikategorikan sebagai "Zona Biru" dengan tantangan aksesibilitas tinggi.

Model Operasional: Membutuhkan pendekatan mikro, yakni SPPG skala kecil hingga menengah yang berbasis komunitas atau sekolah (School-Based Kitchen/Community Kitchen).

Logistik: Tantangan utama di sini bukan pada jumlah porsi yang harus dimasak, melainkan pada jarak tempuh (mileage) dan kontur geografis (tanjakan, tikungan tajam) yang menyulitkan pengiriman dari luar wilayah. Jika makanan dikirim dari Pandaan ke Tosari, risiko penurunan suhu (thermal degradation) sangat tinggi, sehingga makanan sampai dalam kondisi dingin dan tidak layak.

Solusi: Pendekatan desentralisasi penuh. Bahan baku diolah, dimasak, dan disajikan langsung di lokasi yang sangat dekat dengan sekolah (misalnya memanfaatkan dapur warga atau BUMDes setempat). Strategi ini memastikan siswa di pelosok pegunungan tetap menerima haknya berupa makanan dalam kondisi hangat, segar, dan aman dikonsumsi, setara dengan rekan mereka di kota.

Setelah membedah aspek spasial (kewilayahan), analisis beralih pada aspek substansi penerima manfaat. Dalam konteks perencanaan teknis khususnya penyusunan standar gizi, variasi menu, dan perhitungan angka kecukupan energi data demografi yang paling krusial dan fundamental untuk dibedah adalah komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur (kohort).

Data demografi tahun 2023 menunjukkan fakta yang menggembirakan sekaligus menantang: struktur penduduk Kabupaten Pasuruan didominasi secara signifikan oleh kelompok usia anak-anak dan remaja. Dominasi kuantitas pada segmen usia ini mengonfirmasi bahwa Program MBG bukan sekadar program bantuan sosial biasa, melainkan sebuah intervensi masif yang menyasar fondasi demografis daerah. Pemahaman terhadap struktur umur ini penting karena kebutuhan kalori siswa PAUD (Balita) tentu berbeda secara signifikan dengan kebutuhan kalori siswa SMK yang sedang masa pertumbuhan fisik puncak (growth spurt).

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (jiwa).

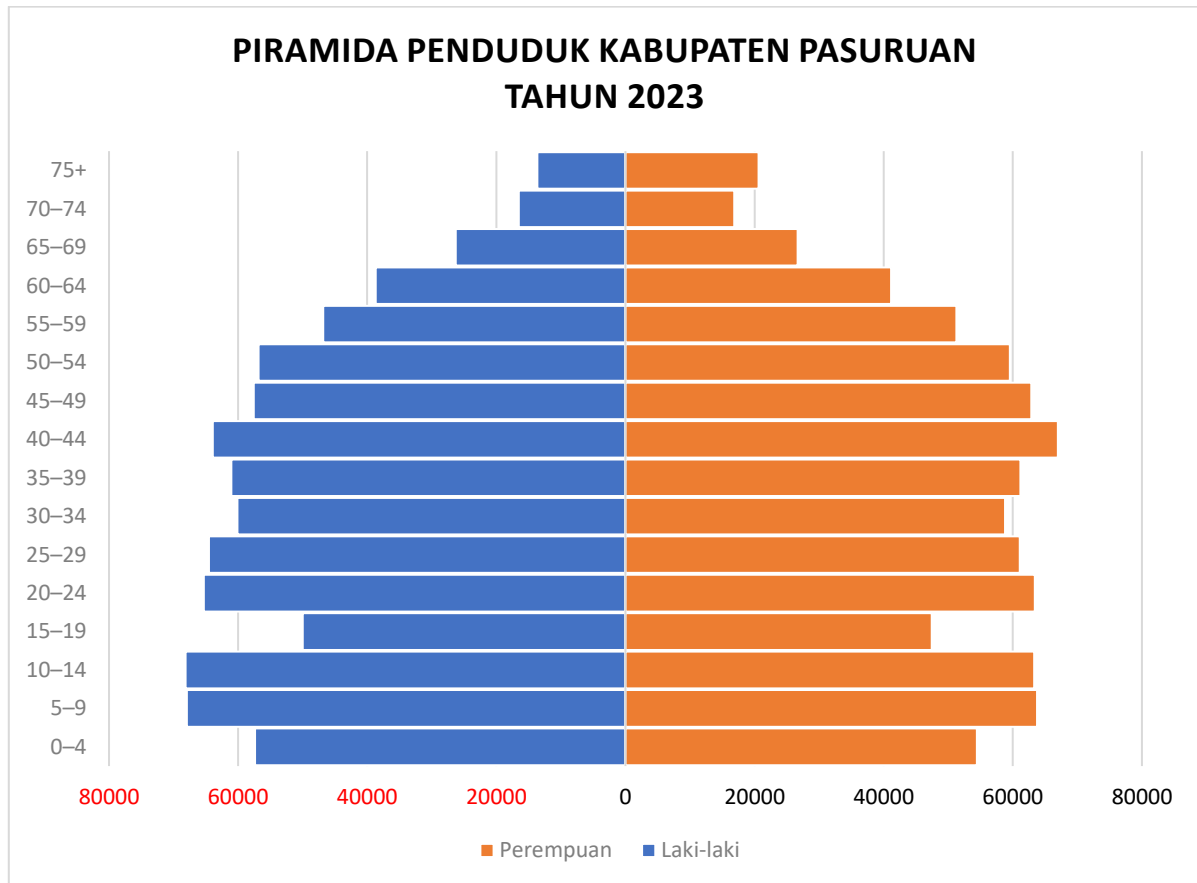
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	57.390	54.455	111.845
5–9	67.954	63.770	131.724
10–14	68.140	63.310	131.450
15–19	49.989	47.438	97.427
20–24	65.301	63.411	128.712
25–29	64.532	61.061	125.593
30–34	60.103	58.794	118.897
35–39	61.026	61.163	122.189
40–44	63.923	66.966	130.889
45–49	57.588	62.864	120.452
50–54	56.852	59.522	116.374
55–59	46.808	51.252	98.060
60–64	38.708	41.129	79.837
65–69	26.291	26.643	52.934
70–74	16.499	16.869	33.368
75+	13.658	20.613	34.271
Kabupaten Pasuruan	814.762	819.260	1.634.022

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2023

Dari tabel di atas, analisis difokuskan pada Kelompok Sasaran Prioritas:

1. Kohort 0-4 tahun (111.845 jiwa): Sasaran intervensi PAUD untuk pencegahan stunting dini.
2. Kohort 5-14 tahun (263.174 jiwa): Sasaran utama siswa SD dan SMP yang membutuhkan asupan energi makro untuk aktivitas belajar.
3. Kohort 15-19 tahun (97.427 jiwa): Sasaran siswa SMA/SMK. Pada kelompok ini, intervensi gizi memiliki dimensi gender yang spesifik. Remaja putri (47.438 jiwa) memerlukan asupan zat besi ekstra melalui menu MBG untuk mencegah

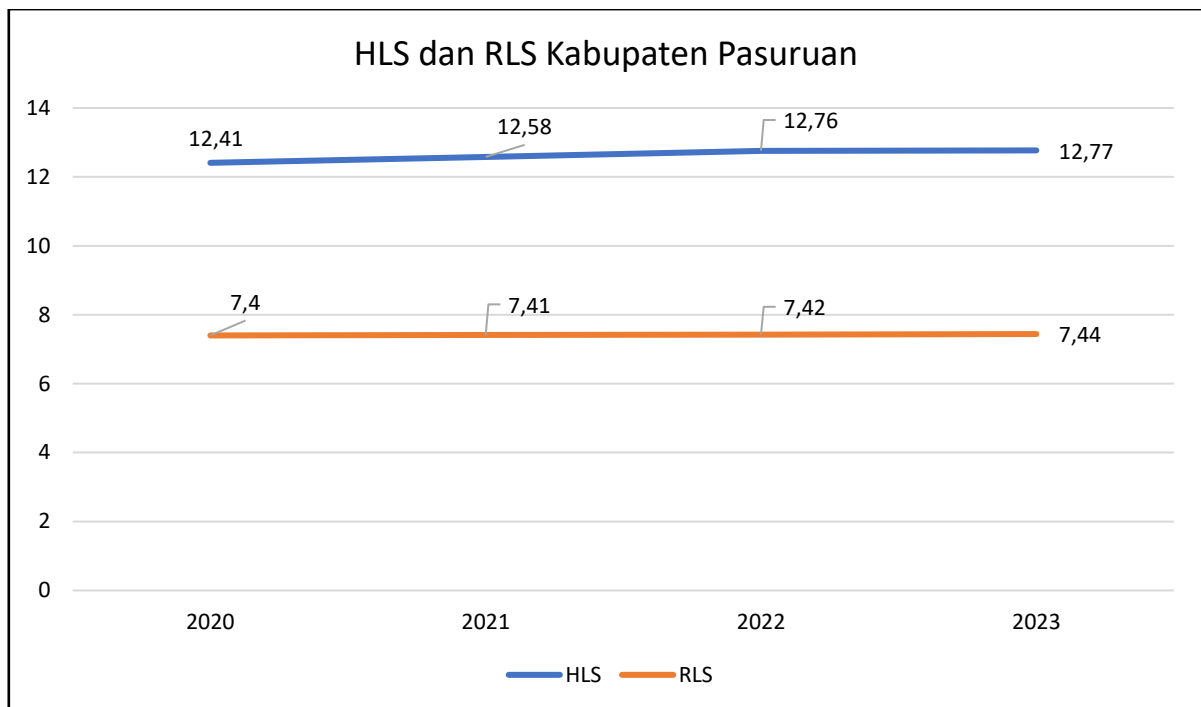
anemia, mengingat mereka adalah calon ibu di masa depan. Sedangkan remaja putra membutuhkan kalori tinggi untuk mendukung pertumbuhan fisik dan kesiapan kerja industri.



Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2023,
diolah

Bentuk piramida penduduk yang melebar di bagian bawah menunjukkan bahwa beban tanggungan usia muda cukup besar. Kondisi ini menjadi landasan empiris bagi kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk memprioritaskan layanan dasar. Keberhasilan pembangunan manusia ini diukur salah satunya melalui indikator pendidikan:



Gambar 2.4 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2023

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan data time-series, terlihat tren peningkatan. Pada tahun 2022, Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 12,76 tahun, namun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) aktual masih berada di angka 7,46 tahun (2023). Kesenjangan (gap) yang cukup lebar antara harapan dan realitas ini mengindikasikan masih banyaknya siswa yang putus sekolah sebelum menamatkan wajib belajar 12 tahun.

Di sinilah Program MBG hadir sebagai solusi intervensi ganda. Selain memperbaiki gizi, jaminan makan siang gratis berfungsi sebagai insentif ekonomi bagi orang tua kurang mampu untuk tetap menyekolahkan anaknya. Dengan hilangnya beban biaya uang saku/makan siang, hambatan ekonomi untuk bersekolah dapat diminimalisir, sehingga secara bertahap kesenjangan antara HLS dan RLS dapat dipersempit menuju standar kualitas SDM yang diharapkan.

2.3 Ekonomi

Kinerja perekonomian daerah merupakan indikator makro yang sangat vital, fundamental, dan tak tergantikan untuk mengukur "kesehatan" sebuah wilayah. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, data ekonomi berfungsi ganda: sebagai

barometer kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai agenda pembangunan, sekaligus sebagai potret otentik tingkat kesejahteraan masyarakat secara agregat. Namun, dalam konteks perencanaan pembangunan manusia yang holistik seperti persiapan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) data ekonomi tidak boleh lagi dipandang sekadar deretan angka statistik yang mati. Lebih dari itu, indikator ini memberikan gambaran mengenai potensi sumber daya riil (real resources) yang dapat dimobilisasi untuk mendukung ekosistem program.

Analisis ekonomi yang mendalam ini menjadi landasan rasionalitas bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menyusun strategi sinergi pendanaan (blended finance). Program MBG, yang notabene merupakan program nasional yang masif, membutuhkan daya dukung ekonomi lokal yang kuat. Sebuah daerah dengan ekonomi yang tumbuh positif mengindikasikan adanya perputaran arus kas yang sehat di tingkat masyarakat, kesiapan sektor swasta (vendor/supplier), dan stabilitas harga pasar yang terjaga, yang semuanya merupakan prasyarat mutlak bagi kelancaran operasional harian suplai makanan siswa.

Untuk membedah anatomi ekonomi tersebut, indikator utama yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Kabupaten Pasuruan meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan dua pendekatan analisis:

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB): Digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi dan nilai pasar (market value) output ekonomi daerah saat ini.
2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK): Digunakan sebagai instrumen yang lebih murni untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil (real growth) dengan mengeluarkan faktor inflasi, sehingga kita bisa melihat apakah volume produksi barang dan jasa benar-benar meningkat.

Selain itu, indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menjadi penunjuk arah (trajectory) kemajuan daerah dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi pada hakikatnya merupakan representasi dari peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah. Berdasarkan bedah data indikator makro, struktur perekonomian Kabupaten Pasuruan menunjukkan karakteristik yang sangat unik, kuat, dan menguntungkan bagi implementasi MBG.

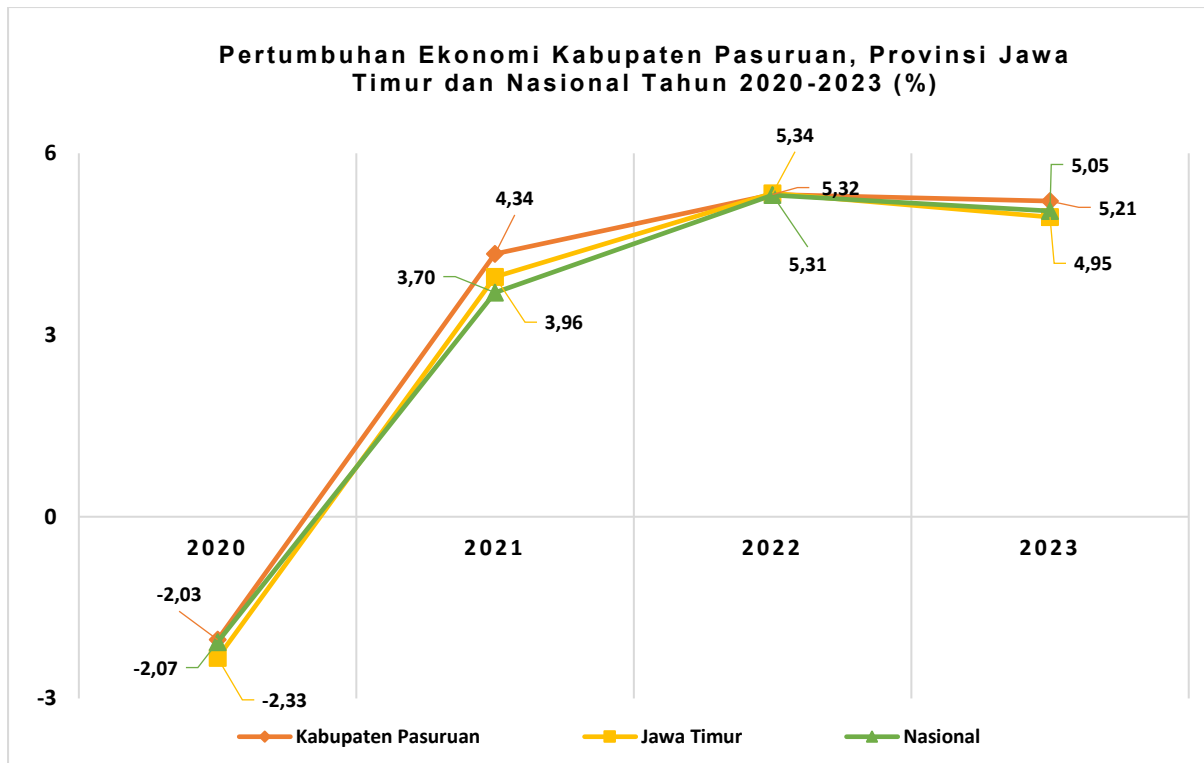
Kabupaten Pasuruan memiliki struktur ekonomi "Mesin Ganda" (Dual-Engine Economy):

1. Basis Industri Pengolahan: Pasuruan adalah salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Keberadaan industri makanan-minuman yang masif menjamin ketersediaan teknologi pengolahan pangan yang bisa diadopsi oleh SPPG.
2. Basis Pertanian yang Signifikan: Di sisi lain, sektor agraris tetap menjadi penopang yang kokoh. Hal ini menjadikan Pasuruan memiliki keunggulan komparatif sebagai daerah produsen pangan, bukan sekadar konsumen.

Kombinasi ini menciptakan ekosistem yang ideal: bahan baku tersedia dari petani (hulu) dan kapasitas pengolahan tersedia di sektor industri (hilir). Selama periode analisis terakhir, nilai PDRB Kabupaten Pasuruan terus menunjukkan tren positif, yang merefleksikan adanya aktivitas ekonomi yang produktif, ekspansif, dan inklusif.

Lebih jauh, kondisi perekonomian Kabupaten Pasuruan selama empat tahun terakhir menunjukkan tingkat Resiliensi Ekonomi (Economic Resilience) yang cukup impresif. Setelah sempat mengalami tekanan berat akibat kontraksi ekonomi global dan pembatasan aktivitas pada masa pandemi Covid-19, perekonomian daerah mampu bangkit dengan cepat (rebound) mulai tahun 2021. Pola pemulihan ini menunjukkan kurva V-Shaped Recovery yang solid. Tren pemulihan ini berlanjut secara konsisten hingga kondisi perekonomian mencapai titik stabilitas makro yang menjanjikan saat ini. Stabilitas ini sangat penting bagi Program MBG, karena meminimalisir risiko volatilitas harga bahan pangan yang dapat mengganggu anggaran belanja makan siang siswa.

Untuk memberikan gambaran visual yang empiris mengenai tren pemulihan dan pertumbuhan tersebut, adapun kondisi perekonomian Kabupaten Pasuruan dapat dilihat secara rinci pada grafik berikut:



Gambar 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2023 (%)

Analisis terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada Gambar 2.5 memperlihatkan dinamika pemulihan dan ekspansi pasca tantangan global. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tercatat sangat impresif di angka 5,21 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa roda perekonomian daerah bergerak cukup akseleratif. Capaian ini menjadi modal dasar yang kuat bagi ekosistem usaha di daerah.

Namun, perlu dicatat dengan kehati-hatian (prudent) bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali diiringi oleh tantangan ketimpangan distribusi pendapatan (inequality). Fenomena ini sangat relevan dengan urgensi penyelenggaraan Program MBG. Meskipun secara agregat daerah ini tergolong "kaya" dengan PDRB yang tinggi, namun fakta di lapangan menunjukkan masih terdapat kantong-kantong populasi yang tertinggal (kelompok rentan) yang tidak dapat mengakses layanan pasar secara optimal, termasuk pemenuhan gizi dan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi kebijakan redistributif melalui intervensi gizi langsung kepada anak sekolah.

Jika ditinjau dari sisi penawaran (sektoral), struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan sangat didominasi oleh sektor sekunder, khususnya Industri Pengolahan. Kontribusi sektor ini sangat dominan dalam pembentukan "kue ekonomi" daerah, menjadikan Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu lumbung industri utama di Jawa Timur.

Kendati demikian, sektor primer seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap memegang peranan strategis dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Hal ini bukan hanya karena sektor ini menjadi basis mata pencaharian masyarakat pedesaan, tetapi juga karena sektor inilah yang akan menjadi tulang punggung suplai bahan baku (Supply Chain Backbone) bagi Program MBG. Keberhasilan penyediaan jutaan porsi makanan setiap tahun sangat bergantung pada produktivitas sektor pertanian lokal ini.

Berikut adalah rincian kontribusi sektoral dalam perekonomian Kabupaten Pasuruan yang disajikan secara time series:

Tabel 2.6 Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha

Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.64	6.78	6.24	6.01	5.92
Pertambangan dan Penggalian	0.55	0.52	0.51	0.50	0.49
Industri Pengolahan	57.68	58.97	60.25	60.42	60.42
Pengadaan Listrik dan Gas	0.85	0.85	0.87	0.87	1.05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Konstruksi	12.44	11.94	11.20	11.08	10.75
Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.86	9.25	9.59	9.85	9.94
Transportasi dan Pergudangan	0.67	0.65	0.64	0.71	0.78
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.00	3.47	3.43	3.58	3.73
Informasi dan Komunikasi	2.63	2.88	2.84	2.72	2.71
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.81	0.83	0.80	0.78	0.76

Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Real Estate	0.70	0.74	0.70	0.67	0.64
Jasa Perusahaan	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.19	1.21	1.10	1.00	0.99
Jasa Pendidikan	0.70	0.73	0.67	0.61	0.60
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.15	0.17	0.17	0.16	0.16
Jasa Lainnya	0.99	0.86	0.85	0.89	0.93
Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
PDRB Tanpa MIGAS	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka 2023

Data pada Tabel 2.6 menunjukkan dominasi Industri Pengolahan yang mencapai 60,42% pada tahun 2023, sementara sektor Pertanian berada di angka 5,92%. Korelasi antara struktur ekonomi makro ini dengan penyelenggaraan MBG sangat erat dan bersifat saling menguatkan (*mutually reinforcing*):

1. Sisi Rantai Pasok (*Supply Side*): Meskipun kontribusi PDRB sektor pertanian terlihat kecil (5,92%), sektor ini melibatkan jumlah tenaga kerja yang besar di pedesaan. Program MBG yang mewajibkan penyerapan bahan lokal (susu, telur, sayur) akan menjadi stimulus pasar (*demand shock*) positif bagi sektor ini, berpotensi meningkatkan kontribusi PDRB sektor pertanian di tahun-tahun mendatang melalui mekanisme ekonomi sirkular.
2. Sisi Kualitas SDM (*Human Capital*): Dominasi sektor industri menuntut tenaga kerja dengan produktivitas dan disiplin tinggi. Fakta bahwa masih banyak keluarga bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah menjadi alasan mengapa intervensi negara diperlukan. Program MBG adalah investasi modal manusia untuk memastikan anak-anak dari keluarga ekonomi lemah memiliki status gizi dan kesehatan prima, sehingga kelak mereka mampu bersaing masuk ke sektor industri yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah.

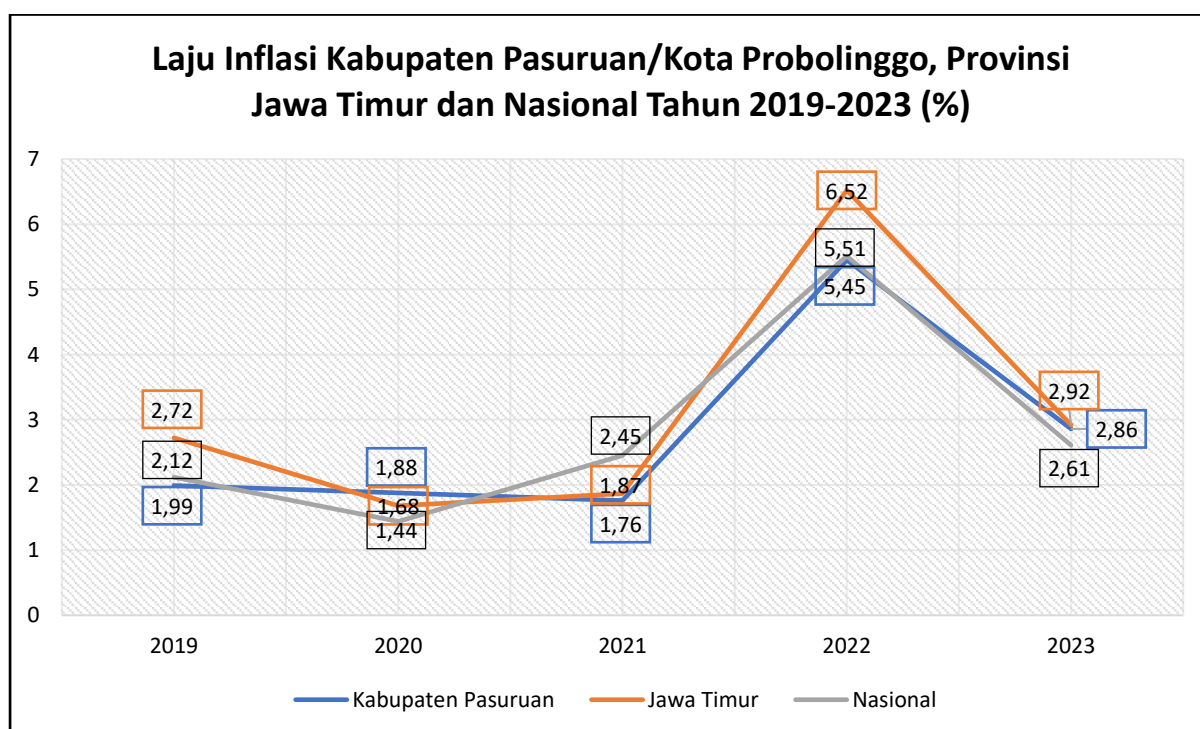
Selain indikator pertumbuhan dan struktur PDRB, stabilitas ekonomi daerah juga sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Inflasi, yang didefinisikan sebagai

perubahan indeks harga konsumen secara berkelanjutan, merupakan variabel makro yang berdampak langsung terhadap daya beli riil masyarakat (purchasing power).

Laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali akan menggerus kemampuan ekonomi rumah tangga. Bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan harga bahan pokok memaksa mereka untuk melakukan trade-off yang menyakitkan: memangkas pengeluaran untuk gizi anak demi kebutuhan lain. Dalam konteks ini, MBG berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang krusial untuk menjaga asupan gizi anak-anak tetap terjamin, terlepas dari fluktuasi harga pangan di pasar.

Berdasarkan data perkembangan harga dalam periode lima tahun terakhir (2019–2023), tren inflasi di Kabupaten Pasuruan (yang diwakili oleh indeks harga Kota Probolinggo sebagai kota acuan survei BPS terdekat) menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun relatif terkendali.

Berikut adalah visualisasi perbandingan laju inflasi daerah disandingkan dengan agregat Jawa Timur dan Nasional:



Gambar 2.6 Inflasi Kabupaten Pasuruan/Kota Probolinggo, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

Meskipun secara umum stabilitas harga terjaga, tercatat terjadi lonjakan inflasi yang cukup signifikan pada tahun 2022. Fenomena ini dipicu oleh faktor eksternal (administered prices), terutama penyesuaian harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga komoditas lainnya. Namun, berkat intervensi kebijakan pengendalian harga yang efektif dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), kondisi inflasi pada tahun 2023 berhasil ditekan kembali ke level yang stabil.

Stabilitas inflasi ini sangat penting untuk memberikan kepastian ekonomi. Namun, bagi kelompok miskin ekstrem, beban biaya hidup tetaplah berat. Oleh karena itu, intervensi spesifik melalui Program MBG yang menanggung biaya makan siang anak menjadi instrumen kebijakan afirmatif yang tidak bisa ditawar lagi untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi.

2.4 Ketenagakerjaan

Pembangunan sektor ketenagakerjaan merupakan dimensi krusial yang harus berjalan beriringan (linier) dengan pembangunan manusia di sektor kesehatan dan pendidikan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas yang erat dan saling memengaruhi; pendidikan dan gizi yang berkualitas bertugas menyuplai tenaga kerja yang kompeten, sehat, dan produktif, sedangkan pasar tenaga kerja bertugas menyerap lulusan tersebut untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.

Dalam kerangka perencanaan strategis Program MBG, analisis terhadap kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan menjadi sangat strategis. Hal ini bertujuan untuk memetakan tantangan dari "sisi penawaran" (supply side) sumber daya manusia. Apakah SDM yang tersedia memiliki kesehatan fisik dan kapasitas kognitif yang memadai untuk memenuhi standar industri? Data ketenagakerjaan memberikan petunjuk vital mengenai seberapa besar daya serap pasar kerja daerah, serta mengidentifikasi adanya kesenjangan kompetensi (skills gap) atau masalah produktivitas yang mungkin menjadi akar penyebab pengangguran. Analisis ini menjadi landasan argumentasi bahwa intervensi gizi melalui MBG adalah investasi jangka panjang untuk mencetak angkatan kerja yang kompetitif dan relevan dengan kebutuhan industri di masa depan.

Indikator utama yang digunakan untuk memotret kondisi ketenagakerjaan daerah secara makro adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan data Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) yang dirilis Badan Pusat Statistik, dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan selama periode tahun terakhir menunjukkan tren pemulihan pasca pandemi yang menggembirakan, meskipun tantangan struktural masih tetap membayangi.

TPAK merepresentasikan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Angka TPAK yang tinggi mengindikasikan bahwa antusiasme dan ketersediaan suplai tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan sangat melimpah. Bonus demografi ini harus dikelola dengan baik; jika tidak, surplus tenaga kerja ini hanya akan menjadi beban jika kualitas kesehatannya rendah (stunting/gizi buruk) dan keterampilannya minim.

Di sisi lain, perhatian khusus harus diberikan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Meskipun secara tren angka TPT menunjukkan penurunan dibandingkan puncak masa krisis, namun angka absolut pengangguran khususnya di kalangan lulusan pendidikan menengah (SMA/SMK) masih menjadi "pekerjaan rumah" besar bagi pemerintah daerah. Fenomena pengangguran terdidik ini seringkali disebabkan oleh dua faktor utama:

1. Ketidaksesuaian (Mismatch): Adanya gap antara kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan spesifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
2. Kualitas SDM Dasar: Masalah ketahanan fisik dan kognitif yang berakar dari kurangnya asupan gizi sejak dini, yang mempengaruhi daya saing saat memasuki dunia kerja yang kompetitif.

Berikut adalah data indikator ketenagakerjaan yang merefleksikan kapasitas penyerapan tenaga kerja dan tingkat partisipasi ekonomi penduduk usia produktif di Kabupaten Pasuruan:

Tabel 2.7 Indikator Utama Ketenagakerjaan, 2021-2023 (Kondisi Agustus)

Indikator	Satuan	2021	2022	2023
Penduduk Usia 15+	Orang	-	-	1.285.630
Angkatan Kerja	Orang	-	-	915.507
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,03	70,19	71,21
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,03	5,91	5,48

Sumber: Kabupaten Pasuruan Dalam Angka 2024

Berdasarkan Tabel 2.7, data menunjukkan adanya peningkatan partisipasi angkatan kerja yang konsisten. TPAK tercatat naik dari 69,03% pada tahun 2021 menjadi 71,21% pada Agustus 2023. Angka ini melampaui rata-rata provinsi maupun nasional, yang mengindikasikan tingginya minat dan desakan ekonomi penduduk Kabupaten Pasuruan untuk masuk ke pasar kerja guna menopang perekonomian keluarga.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan tren penurunan yang positif, menyentuh angka 5,48% pada tahun 2023. Penurunan ini menandakan adanya perbaikan iklim investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Meskipun demikian, angka ini perlu dicermati lebih dalam karena masih berada di atas rata-rata TPT Provinsi Jawa Timur (4,19%). Gap ini menandakan bahwa meskipun Kabupaten Pasuruan adalah daerah industri, kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat. Tingginya laju urbanisasi dan standar kualifikasi industri menuntut tenaga kerja yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga memiliki fisik yang prima dan kecerdasan yang adaptif.

Secara keseluruhan, kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan menuntut adanya intervensi hulu (upstream intervention) berupa perbaikan kualitas modal manusia bagi masyarakat miskin. Jika anak-anak dari keluarga miskin dibiarkan tumbuh dengan gizi buruk dan putus sekolah, mereka kelak hanya akan mengisi pos-pos pekerjaan sektor informal dengan upah rendah dan perlindungan kerja yang

minim. Hal ini pada akhirnya akan melanggengkan lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty).

Oleh karena itu, Program MBG hadir sebagai solusi strategis untuk memotong siklus tersebut. Melalui intervensi gizi dan pendidikan yang terintegrasi dalam MBG, pemerintah daerah berupaya mencetak calon tenaga kerja masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Dengan demikian, struktur ketenagakerjaan daerah di masa depan akan didominasi oleh tenaga kerja produktif yang mampu bersaing di pasar kerja modern, bukan lagi tenaga kerja rentan yang bergantung pada bantuan sosial.

2.5 Kemiskinan

Pembangunan sektor ketenagakerjaan merupakan dimensi krusial yang harus berjalan linier dan beriringan dengan pembangunan manusia di sektor kesehatan dan pendidikan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas yang erat (mutual causality); pendidikan dan gizi yang berkualitas bertugas menyuplai tenaga kerja yang kompeten, sehat, dan produktif (Supply Side), sedangkan pasar tenaga kerja bertugas menyerap lulusan tersebut untuk menggerakkan roda perekonomian daerah (Demand Side).

Dalam kerangka perencanaan strategis Program Makan Bergizi Gratis (MBG), analisis terhadap kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan memiliki dua relevansi strategis. Pertama, untuk memetakan tantangan kualitas SDM masa depan. Apakah angkatan kerja yang tersedia memiliki kesehatan fisik (bebas stunting) dan kapasitas kognitif yang memadai untuk memenuhi standar industri yang ketat? Kedua, untuk mengukur potensi program MBG sebagai instrumen Padat Karya. Pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai kecamatan berpotensi menjadi katup pengaman sosial dengan menyerap tenaga kerja lokal dalam operasional dapur umum.

Indikator utama yang digunakan untuk memotret kondisi ketenagakerjaan daerah secara makro adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan data Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) yang dirilis Badan Pusat Statistik, dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pemulihan pasca pandemi yang menggembirakan, meskipun tantangan struktural masih tetap membayangi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merepresentasikan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Angka TPAK yang tinggi mengindikasikan bahwa antusiasme dan ketersediaan suplai tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan sangat melimpah. Bonus demografi ini harus dikelola dengan presisi; jika tidak, surplus tenaga kerja ini hanya akan menjadi beban demografi apabila kualitas kesehatannya rendah dan keterampilannya minim.

Di sisi lain, perhatian khusus harus diberikan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Meskipun tren menunjukkan penurunan, angka penganggurankhususnya di kalangan usia mudamasih menjadi "pekerjaan rumah" besar. Fenomena ini seringkali disebabkan oleh dua faktor fundamental:

1. Ketidaksesuaian Kompetensi (Skill Mismatch): Adanya kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan spesifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) di Pasuruan.
2. Kualitas SDM Dasar (Isu Fisik & Kognitif): Industri manufaktur di Pasuruan seringkali mensyaratkan standar fisik yang prima. Riwayat kurang gizi pada masa pertumbuhan dapat menyebabkan postur tubuh tidak memenuhi syarat atau daya tahan fisik lemah, sehingga tenaga kerja lokal kalah bersaing dengan pendatang.

Berikut adalah data indikator ketenagakerjaan yang merefleksikan kapasitas penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan:

Tabel 2.8 Indikator Kemiskinan Makro, 2021-2023 (Kondisi Maret)

Indikator	Satuan	2021	2022	2023
Persentase Penduduk Miskin	%	9,70	8,96	9,24
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	159,78	148,62	154,09
Garis Kemiskinan	Rp/Kapita/Bulan	368.686	394.016	429.624
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	-	1,17	1,29	1,22
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	-	0,24	0,29	0,26

Sumber: Kabupaten Pasuruan Dalam Angka 2024

Berdasarkan Tabel 2.7, data menunjukkan adanya peningkatan partisipasi angkatan kerja yang konsisten. TPAK tercatat naik dari 69,03% pada tahun 2021 menjadi 71,21% pada Agustus 2023. Angka ini melampaui rata-rata provinsi maupun nasional, yang mengindikasikan tingginya desakan ekonomi penduduk Kabupaten Pasuruan untuk masuk ke pasar kerja guna menopang perekonomian keluarga.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan tren penurunan positif, menyentuh angka 5,48% pada tahun 2023. Penurunan ini menandakan adanya perbaikan iklim investasi. Namun, angka ini masih berada di atas rata-rata TPT Provinsi Jawa Timur (4,19%). Gap ini wajar mengingat karakteristik Kabupaten Pasuruan sebagai magnet industri yang menarik migrasi tenaga kerja dari luar daerah (in-migration), sehingga kompetisi perebutan kerja menjadi sangat ketat.

Implikasi Program MBG terhadap Ketenagakerjaan:

Analisis kondisi di atas menegaskan bahwa Program MBG hadir bukan hanya sebagai program sosial, melainkan sebagai Strategi Ekonomi Ganda:

1. Intervensi Jangka Panjang (Investasi Modal Manusia): Program MBG berfungsi memutus rantai "tenaga kerja murah" dan rentan. Dengan menjamin asupan protein hewani dan susu setiap hari bagi siswa, pemerintah daerah sedang mencetak calon angkatan kerja masa depan yang memiliki postur fisik tegap, otak cerdas, dan imunitas kuat. Hal ini akan meningkatkan daya saing warga asli Pasuruan untuk mengisi posisi-posisi strategis di industri lokal pada 5-10 tahun mendatang, meminimalkan dominasi tenaga kerja luar.
2. Intervensi Jangka Pendek (Penciptaan Lapangan Kerja Langsung): Operasionalisasi Program MBG melalui pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menciptakan permintaan tenaga kerja baru secara masif (Direct Job Creation). Setiap unit SPPG membutuhkan struktur organisasi operasional yang meliputi: Kepala Satuan Pelayanan, Tenaga Sarjana Gizi (Nutrisionis), Juru Masak (Koki), Tenaga Administrasi, hingga Petugas Logistik/Distribusi. Rekrutmen tenaga kerja ini diprioritaskan bagi warga lokal di sekitar lokasi dapur, sehingga secara langsung berkontribusi menurunkan angka TPT dan menyerap tenaga kerja perempuan dalam sektor jasa boga.

Dengan demikian, Program MBG menjadi solusi konkret atas tantangan ketenagakerjaan daerah, baik melalui peningkatan kualitas suplai SDM maupun melalui penciptaan permintaan tenaga kerja baru di sektor ekonomi kerakyatan.

2.6 Ketimpangan

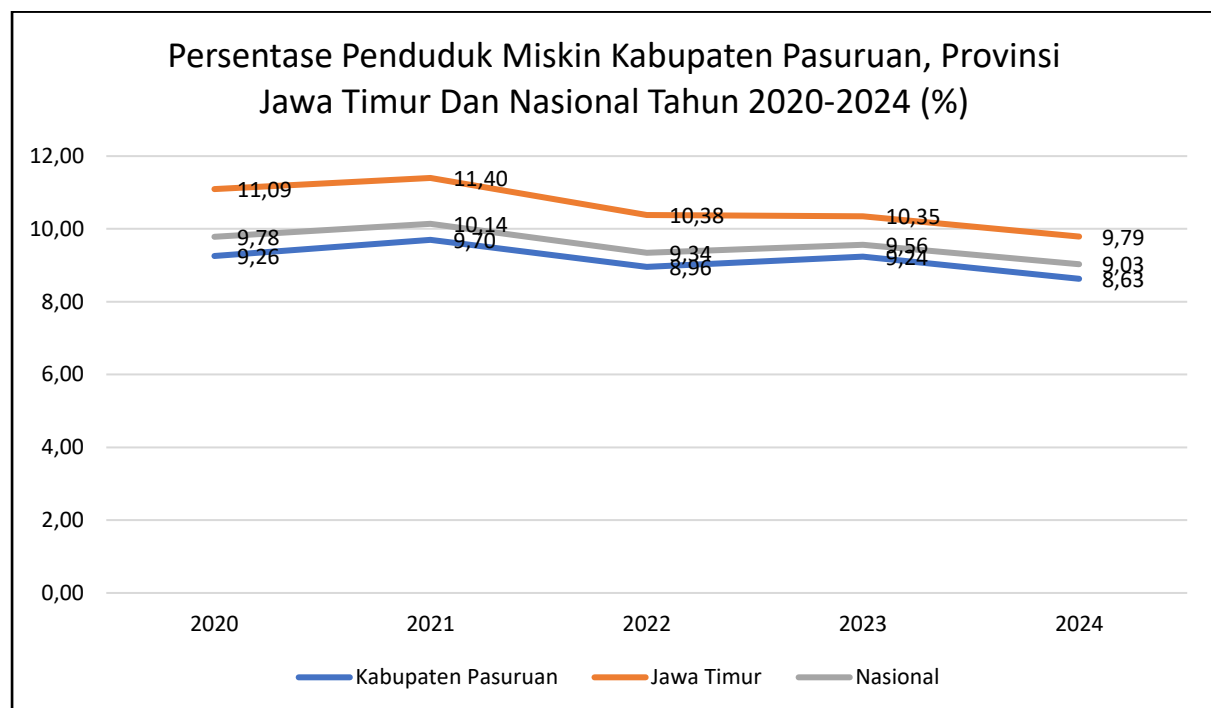
Analisis terhadap profil kemiskinan dan ketimpangan merupakan inti (core) dari seluruh pemetaan kondisi wilayah dalam laporan perencanaan ini. Data ini bukan sekadar deretan angka statistik, melainkan representasi riil dari warga negara yang belum dapat menikmati standar hidup layak. Dalam konteks penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), data mengenai kedalaman kemiskinan dan ketimpangan pendapatan menjadi basis utama dalam penentuan target sasaran (targeting) dan strategi intervensi.

Tingginya angka kemiskinan seringkali berkorelasi linier dengan tingginya angka putus sekolah. Ketidakmampuan ekonomi keluarga menjadi faktor dominan yang memaksa anak-anak untuk meninggalkan bangku sekolah demi membantu menopang ekonomi keluarga (pekerja anak). Oleh karena itu, penurunan beban pengeluaran keluarga miskin menjadi tujuan antara (intermediate goal) yang krusial dari implementasi MBG.

Analisis kemiskinan tidak cukup hanya melihat jumlah kepala (headcount), tetapi juga harus membedah dimensi kualitas kemiskinan itu sendiri. Hal ini tercermin dalam Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), yang memiliki implikasi teknis terhadap urgensi Program MBG:

1. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1): Menggambarkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada di bawah Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilainya, semakin sulit mereka untuk diangkat dari kemiskinan (hard to alleviate).
2. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2): Menggambarkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri. Nilai P2 yang tinggi mengindikasikan adanya kelompok miskin yang kondisinya jauh lebih buruk dibandingkan kelompok miskin lainnya (miskin ekstrem).

Kondisi P1 dan P2 yang fluktuatif menuntut adanya intervensi yang lebih spesifik daripada sekadar bantuan tunai. Bagi keluarga dengan kedalaman kemiskinan tinggi, bantuan tunai seringkali tergerus untuk kebutuhan darurat lain atau pembayaran utang, sehingga gizi anak tetap terabaikan. Di sinilah Program MBG berfungsi sebagai Transfer Barang (In-Kind Transfer). Dengan negara memberikan makan siang dan susu secara langsung di sekolah, pemerintah menjamin bahwa bantuan tersebut 100% masuk ke tubuh anak, tidak terdistorsi untuk penggunaan lain. Secara ekonomi, hal ini meningkatkan disposable income (pendapatan yang siap dibelanjakan) orang tua karena pos belanja makan siang anak hilang. Berikut adalah data perkembangan indikator kemiskinan daerah:

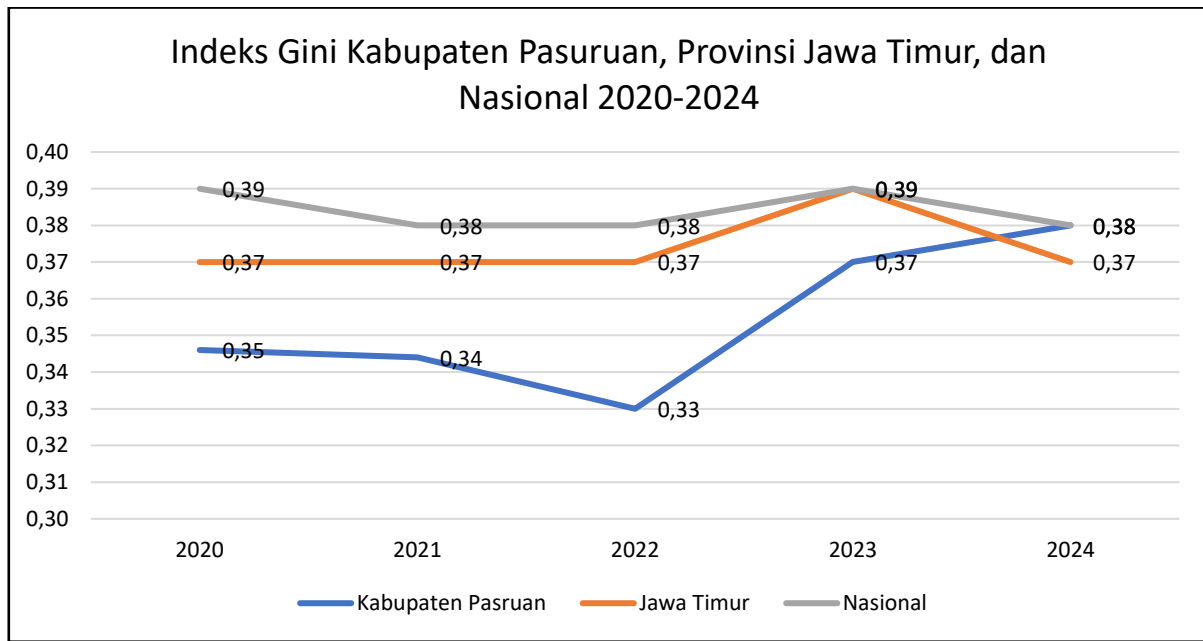


Gambar 2.7 Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah diukur menggunakan indikator Gini Ratio. Indikator ini berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna).

Berdasarkan data time-series, Kabupaten Pasuruan berhasil menjaga tingkat ketimpangan pada level yang moderat. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang sektor industri berupaya bersifat inklusif. Namun, upaya menjaga Rasio Gini agar tetap rendah harus terus dilakukan melalui kebijakan

afirmatif seperti MBG. Program ini menciptakan Kesetaraan Kesempatan (Equality of Opportunity); anak dari keluarga miskin dan anak dari keluarga kaya mendapatkan menu makan siang yang sama kualitasnya di sekolah. Hal ini menghilangkan disparitas gizi yang selama ini menjadi penyebab ketimpangan kecerdasan di masa depan.



Gambar 2.8 Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2020-2024

Sumber: *Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

Selain indikator kemiskinan makro, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menaruh perhatian khusus dan prioritas tinggi pada penanganan Kemiskinan Ekstrem. Hal ini selaras dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Kelompok miskin ekstrem ini diposisikan sebagai sasaran prioritas utama (top priority beneficiaries) dari Program MBG. Karakteristik kelompok ini tidak hanya miskin secara moneter (pendapatan), tetapi juga mengalami deprivasi kapabilitas dasar yang multidimensi, terutama Rawan Pangan Kronis. Bagi keluarga miskin ekstrem, makan bergizi (protein hewani/daging/susu) adalah barang mewah yang jarang terbeli.

Tanpa intervensi radikal seperti jaminan gizi harian yang disediakan oleh MBG, anak-anak dari keluarga miskin ekstrem ini dipastikan akan mewarisi kondisi fisik dan

kognitif yang lemah. Fenomena ini dikenal sebagai transfer kemiskinan antargenerasi (intergenerational poverty transfer).

Melalui MBG, pemerintah memotong siklus biologis kemiskinan tersebut. Dengan memastikan anak-anak miskin ekstrem mendapatkan asupan protein dan nutrisi otak yang cukup setiap hari sekolah, mereka memiliki modal kesehatan yang setara untuk menyerap pendidikan. Harapannya, mereka tumbuh menjadi SDM kompetitif yang mampu mengangkat martabat dan ekonomi keluarganya di kemudian hari, keluar dari jerat kemiskinan ekstrem yang membelenggu orang tua mereka.

2.7 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan ukuran komposit yang berfungsi sebagai barometer utama untuk merefleksikan kualitas hidup penduduk dari tiga dimensi dasar pembangunan yang fundamental: dimensi kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), dimensi pendidikan (pengetahuan dan akses sekolah), serta dimensi ekonomi (standar hidup layak). Dalam perspektif evaluasi kinerja pembangunan, capaian angka IPM bukan sekadar agregat statistik administratif semata, melainkan cerminan otentik dari keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak konstitusional dan hak dasar warganya. Tinggi rendahnya IPM merepresentasikan seberapa jauh masyarakat Kabupaten Pasuruan dapat mengakses hasil-hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Dalam konteks perencanaan strategis Program Makan Bergizi Gratis (MBG), posisi IPM menjadi sangat sentral. IPM ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator/KPI) yang bersifat outcome jangka panjang. Artinya, keberhasilan Program MBG pada akhirnya tidak dinilai dari berapa juta porsi yang dibagikan, melainkan dari seberapa besar program ini mampu mengungkit angka IPM daerah.

Program MBG didesain secara teknokratis sebagai instrumen Intervensi Lintas Sektor (Cross-cutting Intervention) yang unik, karena mampu mengintervensi dua hingga tiga dimensi IPM sekaligus secara simultan:

(1) Intervensi Dimensi Kesehatan (Umur Harapan Hidup): Melalui perbaikan asupan gizi harian yang terstandar (kalori dan protein), program ini secara langsung menekan angka anemia dan malnutrisi pada anak. Dalam jangka panjang, intervensi ini berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting, yang berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas kesehatan fisik dan Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat. (2) Intervensi Dimensi Pendidikan (Harapan Lama Sekolah & Rata-rata Lama Sekolah): Melalui penyediaan makan siang gratis, program ini menjadi insentif kuat untuk meningkatkan kehadiran (attendance rate) dan retensi siswa di sekolah. Program ini mengurangi angka putus sekolah yang disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi orang tua menyediakan uang saku. Selain itu, asupan gizi yang baik meningkatkan daya konsentrasi (kognitif), yang berdampak pada keberhasilan siswa menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. (3) Intervensi Dimensi Ekonomi (Pengeluaran Per Kapita): Secara tidak langsung, program ini mengurangi beban pengeluaran rumah tangga untuk pos konsumsi pangan anak. Penghematan ini meningkatkan daya beli riil (Purchasing Power Parity) keluarga untuk kebutuhan produktif lainnya, yang pada akhirnya mendorong dimensi standar hidup layak.

Oleh karena itu, pemetaan kondisi eksisting komponen IPM di bawah ini menjadi baseline data yang sangat penting. Data ini menunjukkan titik awal (starting point) sebelum intervensi MBG dilakukan secara masif pada tahun 2025, sehingga kita dapat mengukur dampak inkremental program ini di masa depan. Berikut adalah rincian capaian komponen pembentuk IPM Kabupaten Pasuruan yang menggambarkan kesiapan modal manusia daerah:

Tabel 2.9 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya, 2023

Komponen IPM	Satuan	Capaian 2023
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,91
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	70,81
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,78
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,46
Pengeluaran riil per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/Tahun	11.398

Sumber: Kabupaten Pasuruan Dalam Angka & Indikator Makro Sosial Ekonomi 2024

Berdasarkan data terbaru, IPM Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 mencapai angka 72,36. Capaian ini mengukuhkan posisi Kabupaten Pasuruan dalam

kategori status pembangunan manusia "Tinggi". Akselerasi kenaikan IPM ini didorong oleh perbaikan di seluruh komponen penyusunnya.

Pembangunan manusia adalah esensi dasar dari tujuan bernegara. Dalam lanskap perencanaan pembangunan daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak boleh hanya dipandang sebagai deretan angka statistik tahunan semata, melainkan sebagai kompas navigasi yang menunjukkan sejauh mana Pemerintah Kabupaten Pasuruan berhasil memenuhi hak-hak konstitusional warganya dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Berdasarkan rilis data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, IPM Kabupaten Pasuruan mencatatkan capaian angka 71,91. Angka ini memiliki makna strategis karena secara definitif mengukuhkan posisi Kabupaten Pasuruan dalam kategori status pembangunan manusia "Tinggi". Kenaikan indeks ini merefleksikan adanya perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar. Namun, di balik status "Tinggi" tersebut, jika dibedah lebih dalam (dekomposisi indeks), terdapat tantangan struktural yang masih menyisakan catatan kritis, terutama pada dimensi pengetahuan atau pendidikan. Dimensi ini menjadi "titik lemah" yang memerlukan intervensi radikal agar tidak menjadi penghambat bagi daya saing daerah di masa depan.

Analisis mendalam terhadap komponen pembentuk dimensi pendidikan menyingkap sebuah paradoks atau kesenjangan (gap) yang sangat lebar antara harapan (ekspektasi) dengan realita capaian di lapangan. Fenomena ini tergambar jelas dari komparasi dua indikator berikut:

1. Harapan Lama Sekolah (HLS) = 12,78 Tahun

Angka ini merepresentasikan "optimisme masa depan". Secara statistik, anak-anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 memiliki peluang atau harapan untuk menempuh pendidikan selama 12,78 tahun. Ini setara dengan menamatkan jenjang SMA/SMK dan melanjutkan ke jenjang Diploma I (D1) atau semester awal perguruan tinggi. Tingginya angka HLS ini menunjukkan bahwa aksesibilitas fasilitas pendidikan (ketersediaan sekolah) di Kabupaten Pasuruan sudah cukup merata dan sistem penerimaan siswa baru berjalan baik.

2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) = 7,46 Tahun

Di sisi lain, angka ini merepresentasikan "realitas masa kini". Data ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Pasuruan yang berusia 25 tahun ke atas yang saat ini menjadi tulang punggung angkatan kerja hanya mengenyam pendidikan selama 7,46 tahun. Jika dikonversi ke jenjang pendidikan formal, angka ini bermakna bahwa mayoritas penduduk dewasa di Kabupaten Pasuruan rata-rata hanya tamat Kelas 1 SMP (Kelas 7) atau bahkan putus sekolah di tengah jenjang tersebut.

Analisis "The Educational Bottleneck" (Sumbatan Pendidikan) Kesenjangan (gap) sebesar 5,32 tahun antara apa yang diharapkan (HLS) dengan apa yang terjadi (RLS) adalah sebuah "lampu kuning" atau peringatan dini bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Angka 5,32 tahun bukan sekadar selisih matematis, melainkan indikasi kuat adanya fenomena "gugur di tengah jalan" (mass dropout). Banyak anak yang terdaftar masuk di Sekolah Dasar (SD), namun gagal bertahan hingga menuntaskan pendidikan menengah (SMA/SMK).

Pertanyaan fundamentalnya adalah: Mengapa mereka berhenti bersekolah? Analisis sosio-ekonomi menunjukkan bahwa hambatan utama bukan lagi pada ketersediaan gedung sekolah (akses fisik), melainkan pada akses ekonomi. Bagi keluarga miskin dan rentan miskin, menyekolahkan anak menimbulkan dua jenis biaya yang memberatkan:

1. Biaya Langsung (Direct Cost): Meskipun SPP gratis, orang tua tetap terbebani oleh biaya operasional harian seperti uang saku makan siang, transportasi, dan perlengkapan sekolah.
2. Biaya Peluang (Opportunity Cost): Bagi keluarga pra-sejahtera, anak yang beranjak remaja seringkali dianggap sebagai aset ekonomi yang harus segera bekerja membantu nafkah keluarga. Membiarkan anak tetap sekolah dianggap "merugikan" karena menunda pendapatan.

Di sinilah letak urgensi dan peran strategis Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini hadir bukan sekadar sebagai program kesehatan, melainkan sebagai instrumen Jaring Pengaman Pendidikan (Educational Safety Net) yang menjawab kedua hambatan biaya di atas.

Melalui penyediaan makan siang bergizi lengkap dan susu gratis setiap hari di sekolah, negara melakukan intervensi fiskal langsung ke tingkat rumah tangga (mikro). MBG berfungsi sebagai Transfer Barang (In-Kind Transfer) yang secara efektif mengambil alih beban biaya konsumsi anak selama berada di sekolah. Dengan hilangnya pos pengeluaran uang makan, disposable income (pendapatan yang bisa dibelanjakan) orang tua menjadi lebih longgar. Penghematan ini diharapkan dapat dialihkan untuk kebutuhan penunjang pendidikan lainnya (buku, seragam, transportasi), sehingga alasan "tidak ada biaya" tidak lagi relevan untuk menghentikan sekolah anak.

Lebih dari itu, MBG bertindak sebagai "Insentif Kehadiran" (Attendance Incentive). Kepastian mendapatkan makanan enak dan bergizi menjadi magnet yang kuat bagi siswa untuk rajin datang ke sekolah dan bagi orang tua untuk mempertahankan anaknya tetap bersekolah. Dengan demikian, MBG secara sistematis bekerja untuk menutup celah lebar antara HLS dan RLS, memastikan bahwa harapan sekolah 12 tahun benar-benar terkonversi menjadi lulusan yang berkualitas.

Implikasi Jangka Panjang: Memutus Rantai Setan Kemiskinan dan Stunting. Stagnasi RLS di angka 7,46 tahun memiliki implikasi domino yang sangat serius dan mengerikan jika tidak segera diatasi, khususnya terkait isu stunting dan kualitas generasi penerus. Terdapat korelasi linier yang kuat dan tak terbantahkan antara tingkat pendidikan (RLS) dengan status kesehatan dan kemiskinan:

1. Korelasi Pendidikan dengan Pola Asuh (Parenting Quality):

Rendahnya tingkat pendidikan, khususnya pada kaum ibu, berdampak langsung pada rendahnya literasi gizi dan kesehatan. Ibu yang tidak tamat SMP cenderung memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai sanitasi, higiene, dan pentingnya gizi seimbang pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Akibatnya, risiko melahirkan dan membesarkan anak stunting menjadi jauh lebih tinggi.

2. Korelasi Pendidikan dengan Daya Beli (Purchasing Power):

Di pasar tenaga kerja modern, lulusan SMP ke bawah (sesuai RLS 7,46) umumnya hanya terserap di sektor informal atau buruh kasar dengan upah

minimum atau di bawahnya. Rendahnya pendapatan ini membatasi kemampuan daya beli keluarga terhadap pangan protein hewani (daging, telur, susu) yang mahal. Inilah lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty): Orang tua miskin anak kurang gizi & putus sekolah anak menjadi dewasa miskin melahirkan cucu kurang gizi.

Oleh karena itu, strategi peningkatan RLS melalui Program MBG tidak boleh dipandang secara sempit hanya sebagai target sektor pendidikan atau kesehatan secara parsial. Program ini merupakan Agenda Investasi Modal Manusia (Human Capital Investment) yang bersifat holistik dan jangka panjang.

Dengan memastikan anak-anak yang notabene adalah calon ayah dan ibu di masa depan tetap bersekolah hingga lulus SMA/SMK karena insentif makanan gratis, kita sedang melakukan rekayasa sosial (social engineering) besar-besaran. Kita mencetak calon orang tua masa depan yang:

1. Secara fisik lebih sehat dan bebas stunting (karena asupan gizi terjaga semasa sekolah).
2. Secara intelektual lebih cerdas (karena sekolah lebih lama dan otak ternutrisi).
3. Secara ekonomi lebih produktif (karena memiliki ijazah SMA/SMK untuk bekerja di sektor formal).

Meskipun capaian IPM 71,91 saat ini patut diapresiasi, angka ini belum cukup aman untuk bersaing di level regional maupun global. Capaian ini masih perlu didorong secara agresif untuk mengejar dan melampaui rata-rata IPM Jawa Timur dan Nasional. Kesenjangan kualitas SDM tidak bisa ditunggu untuk membaik dengan sendirinya (business as usual).

Hal inilah yang menjadi pemicu utama (trigger) bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk melakukan upaya akselerasi (catching up strategy) melalui alokasi sumber daya yang masif pada Program Makan Bergizi Gratis. Ini adalah bentuk keberpihakan anggaran (affirmative action) untuk memastikan bahwa setiap rupiah APBD/APBN yang keluar, berdampak ganda pada perut yang kenyang hari ini dan otak yang cerdas di masa depan.

BAB III

METODE PELAKSANAAN DAN TEKNIS OPERASIONAL

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pasuruan tidak didesain secara sederhana sebagai program bantuan sosial konvensional yang bersifat karitatif semata. Lebih dari sekadar aktivitas berbagi makanan, program ini diterjemahkan sebagai sebuah operasi manajemen rantai pasok (supply chain management) yang terintegrasi, terukur, dan berstandar industrial. Transformasi paradigma ini dianggap mutlak diperlukan mengingat skala operasional program yang masif, di mana ribuan porsi makanan harus diproduksi dan didistribusikan setiap harinya dengan tingkat presisi yang tinggi. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan bukanlah pendekatan birokrasi biasa, melainkan pendekatan teknokratis yang menekankan pada efisiensi alur logistik, ketepatan waktu distribusi, serta jaminan mutu produk akhir yang sampai ke tangan penerima manfaat.

Secara metodologis, pelaksanaan program ini mengacu secara ketat pada kerangka kerja regulasi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pemegang otoritas pusat. Namun, dalam tataran implementasi di lapangan, standar nasional tersebut dikontekstualisasikan dengan kearifan lokal dan potensi kelembagaan daerah yang unik. Sinergi antara standar pusat dan potensi lokal ini menciptakan model operasional yang adaptif; di mana kepatuhan terhadap regulasi tetap terjaga, namun di sisi lain mampu memberdayakan ekosistem ekonomi lokal seperti pelibatan BUMDes, Koperasi, dan petani setempat sebagai tulang punggung penyediaan bahan baku. Strategi ini memastikan bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi, tetapi juga menjadi stimulus bagi perputaran roda ekonomi kerakyatan di Kabupaten Pasuruan.

Bertolak dari kerangka pemikiran tersebut, Bab ini akan menguraikan secara rinci cetak biru (blueprint) operasional program. Pembahasan akan dimulai dari bedah arsitektur kelembagaan untuk memetakan garis komando dan tanggung jawab, dilanjutkan dengan analisis spesifikasi infrastruktur fisik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memenuhi standar sanitasi medis. Terakhir, bab ini akan menjabarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) produksi dan distribusi yang menjadi "kitab suci" pelaksanaan harian. Ketiga pilar ini Kelembagaan, Infrastruktur,

dan SOP merupakan satu kesatuan sistem yang menjadi tulang punggung keberhasilan program dalam mewujudkan generasi emas yang sehat dan cerdas.

3.1 Desain Kelembagaan dan Manajemen Sumber Daya Manusia

Keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesungguhnya tidak semata-mata bergantung pada besaran ketersediaan anggaran (fiskal) atau kemegahan infrastruktur fisik yang dibangun. Lebih jauh dari itu, keberlanjutan program ini sangat ditentukan oleh keandalan desain kelembagaan (institutional arrangement) dan kualitas modal manusia (human capital) yang menggerakkannya. Hal ini menjadi krusial mengingat Program MBG bukanlah sekadar aktivitas memasak rutin, melainkan sebuah operasi manajemen rantai pasok (supply chain management) berskala industri yang memiliki risiko tinggi.

Menyadari kompleksitas operasional yang melibatkan produksi massal ribuan porsi makanan setiap harinya, Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah preventif dengan merumuskan model manajemen yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Tantangan di lapangan sangatlah nyata; mulai dari potensi kontaminasi pangan, ketepatan waktu distribusi, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, pendekatan manajemen yang diambil tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional, melainkan harus menerapkan standar keamanan pangan yang ketat layaknya operasional manufaktur, namun tetap memiliki sentuhan humanis dalam pelayanannya.

Dalam merespons tantangan tersebut, desain kelembagaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pasuruan secara sadar mengadopsi struktur organisasi modern yang bersifat "agile" (lincah). Model ini menjadi antitesis dari pola birokrasi tradisional yang cenderung kaku, hierarkis, dan lambat dalam pengambilan keputusan. Dalam struktur yang lincah ini, setiap unit kerja memiliki otonomi terkendali untuk menyelesaikan masalah operasional di lapangan secara cepat tanpa harus menunggu rantai komando yang terlalu panjang, terutama dalam situasi darurat yang menyangkut keamanan pangan siswa.

Struktur organisasi yang inovatif ini dibangun di atas fondasi kolaborasi Triple Helix yang kokoh. Sinergi ini mempertemukan tiga kekuatan utama: Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai regulator pusat yang menetapkan standar mutu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagai fasilitator daerah yang menyediakan dukungan aset dan perizinan, serta unsur masyarakat sipil yang direpresentasikan oleh komunitas Pesantren dan kaum Profesi sebagai operator lapangan. Pelibatan unsur masyarakat sipil ini bukan sekadar pelengkap, melainkan strategi kunci untuk meningkatkan sense of belonging (rasa memiliki) masyarakat terhadap program ini, sehingga pengawasan sosial dapat berjalan secara alamiah.

Dalam hal manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Kabupaten Pasuruan menerapkan terobosan strategis yang unik dan menjadi best practice yang belum tentu dimiliki daerah lain. Strategi ini dikristalisasi dalam sebuah model yang disebut sebagai "Teknokrat Berbasis Integritas". Filosofi di balik model ini adalah keyakinan bahwa kompetensi teknis saja tidak cukup untuk mengelola program sosial yang rawan penyelewengan; diperlukan benteng moral yang kuat.

Oleh karena itu, rekrutmen manajerial SPPG tidak hanya melihat ijazah akademik, tetapi juga rekam jejak karakter. "Teknokrat" merujuk pada kualifikasi pendidikan tinggi (Sarjana/Pascasarjana) yang menjamin kemampuan analisis, perencanaan, dan manajerial yang mumpuni. Sementara "Berbasis Integritas" merujuk pada latar belakang sosiologis personel yang mayoritas berasal dari basis kader santri/pesantren yang teruji kejujuran dan etos pengabdian. Perpaduan antara kecerdasan otak (kompetensi) dan kebersihan hati (integritas) inilah yang diharapkan mampu menciptakan tata kelola SPPG yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga akuntabel secara moral dan bebas dari praktik moral hazard.

Berdasarkan data formasi personel SPPG Tahap I, pola rekrutmen tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui seleksi ketat yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tinggi (Sarjana/Pascasarjana) yang dipadukan dengan latar belakang sosiologis yang kuat, yakni basis kader Pesantren Sidogiri. Model ini dipilih untuk menjawab dua tantangan utama sekaligus:

1. Tantangan Kompetensi Teknis: Diatasi dengan merekrut lulusan S1 dan S2 dari berbagai disiplin ilmu saintifik (Teknik Industri, Teknologi Pangan, Manajemen).

2. Tantangan Moral Hazard: Diatasi dengan merekrut kader yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren yang teruji integritas, kejujuran, dan etos pengabdianya.

Para personel ini dilabeli sebagai "Sarjana Penggerak Pembangunan". Mereka bukan sekadar juru masak, melainkan manajer profesional yang ditugaskan untuk mengelola SPPG layaknya sebuah korporasi manufaktur pangan.

Setiap unit SPPG di Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh struktur manajerial yang otonom dalam operasional harian namun terpusat dalam komando standar mutu. Struktur organisasi inti terdiri dari:

- A. Kepala Unit Pelayanan (Unit Manager) Posisi ini diisi oleh tenaga profesional dengan kualifikasi kepemimpinan strategis.
 - a. Tanggung Jawab Utama: Bertanggung jawab penuh atas seluruh siklus operasional SPPG, mulai dari perencanaan menu, manajemen keuangan, hingga pelaporan kinerja kepada BGN.
 - b. Kualifikasi Faktual: Berdasarkan data rekrutmen, posisi ini diisi oleh lulusan S2 dengan spesialisasi yang relevan (seperti Diplomasi Pertahanan atau Manajemen Strategis), yang menunjukkan bahwa Kepala Unit harus memiliki kemampuan koordinasi lintas sektor yang mumpuni.
- B. Wakil Kepala Unit (Deputy Manager)
 - a. Tanggung Jawab Utama: Fokus pada pengawasan teknis rantai pasok (supply chain), memastikan bahan baku datang tepat waktu dari Koperasi/BUMDes, serta mengawasi alur produksi agar sesuai target waktu distribusi (maksimal 20 menit sampai ke sekolah).
 - b. Kualifikasi Faktual: Diisi oleh sarjana S1 dengan latar belakang teknik atau sosial-humaniora yang memiliki kemampuan manajerial taktis.
- C. Tim Operasional Fungsional Di bawah level manajerial, terdapat tim teknis yang bekerja sesuai spesialisasi:
 - a. Ahli Gizi (Nutritionist): Bertugas menghitung nilai kalori dan protein setiap menu, serta melakukan Quality Control (QC) rasa dan kebersihan.

- b. Petugas Logistik: Mengelola gudang penyimpanan (inventory control) menggunakan prinsip First-In-First-Out (FIFO) untuk mencegah pembusukan bahan makanan.
- c. Juru Masak (Chef): Melaksanakan produksi makanan sesuai SOP Higiene Sanitasi Pangan.

Bukti keseriusan Kabupaten Pasuruan dalam menyiapkan SDM yang "sangat berbobot" terlihat dari profil latar belakang pendidikan personel yang telah direkrut. Berikut adalah pemetaan kompetensi tim manajemen SPPG:

Tabel 3.1 Daftar Kepala SPPG Kabupaten Pasuruan

Kepala SPPG		
1	Nama	Pendidikan Terakhir
2	Aisha Rahma Tsania	D4 Gizi Klinik
3	Muhammad Miqdadzi Alfitra	S1 Teknik Industri
4	Mohamad Fauzi Setiawan	S1 Pendidikan Luar Sekolah
5	Teguh Bayu Wibowo	S1 Ilmu Hukum
Wakil Kepala SPPG		
1	Nama	Pendidikan Terakhir
2	Bayu Prakasa	S2 Diplomasi Pertahanan
3	Noverita Resya Sintia	S1 Teknologi Pangan
4	Rosi Dian Prasetyo	S1 Bahasa Indonesia
5	Adystia	S1 Ekonomi

Tabel di atas menunjukkan diversifikasi keahlian yang sangat strategis. Keberadaan personel dengan latar belakang S1 Teknik Industri (seperti Sdr. Muhammad Miqdadzi Alfitra) sangat krusial untuk merancang efisiensi alur produksi pabrikasi makanan. Sementara itu, keberadaan personel dengan latar belakang S1 Teknologi Pangan (seperti Sdri. Noverita Resya Sintia) menjadi garansi atas keamanan mikrobiologis makanan. Bahkan, adanya latar belakang S2 Keamanan Maritim dan Hukum memberikan perspektif kedisiplinan dan kepatuhan regulasi yang ketat dalam pengelolaan aset negara.

Kelembagaan SPPG tidak berdiri sendiri sebagai menara gading. Ia terintegrasi dalam ekosistem ekonomi lokal. Dalam strukturnya, SPPG bermitra dengan Koperasi/BUMDes/UMKM sebagai agregator bahan pangan.

Disinilah peran strategis jejaring Pesantren Sidogiri kembali terlihat. Pesantren tidak hanya menyuplai SDM manajerial, tetapi juga menjadi model inkubasi bagi etos kerja tim. Kedisiplinan ala santri dalam "mengabdikan" (khidmah) ditransformasikan menjadi etos kerja profesional "melayani" siswa sekolah. Sinergi ini menciptakan budaya organisasi (organizational culture) yang unik di SPPG Pasuruan: Modern dalam sistem, namun Religius dalam karakter.

Dengan struktur kelembagaan yang kokoh dan SDM yang memiliki kompetensi teknokratik sekaligus integritas moral ini, risiko kegagalan program akibat inefisiensi, korupsi, atau kesalahan manajemen dapat dimitigasi sejak dini.

3.2 Lokasi dan Spesifikasi Teknis Infrastruktur

Dalam kerangka operasional mass feeding (pemberian makan massal), infrastruktur fisik bukan sekadar cangkang bangunan, melainkan instrumen vital yang menentukan kualitas akhir produk pangan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pasuruan didesain bukan sebagai dapur konvensional, melainkan sebagai fasilitas produksi pangan semi-industrial yang wajib memenuhi standar higienitas medis dan efisiensi logistik.

Penetapan lokasi pembangunan SPPG didasarkan pada Studi Kelayakan Teknis (Technical Feasibility Study) yang mengacu pada parameter "4A": Aksesibilitas (keterjangkauan armada logistik), Aset (status kepemilikan tanah yang legal/clean and clear), Air (ketersediaan suplai air bersih debit tinggi), dan Amper (dukungan daya listrik industri).

Berdasarkan verifikasi lapangan dan pemetaan aset daerah, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menetapkan dua lokasi strategis untuk Pilot Project Tahap I tahun 2025. Kedua lokasi ini merepresentasikan tipologi wilayah yang berbeda (Perkotaan dan Penyangga) untuk menguji keandalan model distribusi logistik.

- A. SPPG Unit Bangil (Hub Logistik Kawasan Industri) Lokasi ini dipilih karena posisinya yang berada di jantung konektivitas wilayah Bangil, memungkinkan distribusi cepat ke sekolah-sekolah di wilayah padat penduduk.
- Alamat Lokasi: Jalan Layur, Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil.
 - Titik Koordinat Geospasial: Latitude -7.596227, Longitude 112.791954.
 - Luas Hampan Lahan: $\pm 3.187,66 \text{ m}^2$.
 - Analisis Tapak (Site Analysis):
 - Kapasitas Ekspansi: Dengan luas mencapai lebih dari 3.000 m^2 , lokasi ini memiliki kapasitas tiga kali lipat dari standar minimal Badan Gizi Nasional (800 m^2). Surplus lahan ini sangat strategis untuk area manuver armada truk boks (loading dock) dan potensi pengembangan gudang penyangga (buffer stock warehouse) di masa depan.
 - Topografi: Kondisi eksisting berupa tanah darat dengan kontur datar (elevasi 0-2%), sehingga meminimalisir biaya dan waktu untuk pekerjaan pematangan lahan (cut and fill). Infrastruktur jalan akses sudah perkerasan aspal lebar yang mampu dilalui kendaraan roda enam.



Gambar 3.1 Peta Citra Satelit dan Dokumentasi Eksisting Lahan SPPG Bangil

- B. SPPG Unit Kraton (Hub Logistik Kawasan Penyangga) Lokasi kedua difokuskan untuk melayani klaster pendidikan di wilayah barat Kabupaten Pasuruan.
- Alamat Lokasi: Kompleks Belakang Koramil Kraton, Kecamatan Kraton.
 - Status Progres Fisik: Under Construction (Sedang Dalam Pembangunan).

- c. Analisis Keamanan & Strategis: Pemilihan lokasi yang berdampingan dengan fasilitas militer (Koramil) memberikan keuntungan ganda:
- Jaminan Keamanan Aset: Memitigasi risiko sabotase atau gangguan keamanan terhadap stok bahan pangan strategis.
 - Aksesibilitas: Terletak di jalan poros utama Pasuruan-Bangil, memudahkan suplai bahan baku masuk.



Gambar 3.2 Progres Konstruksi Struktur SPPG Kraton

Berbeda dengan kantin sekolah biasa, desain interior SPPG di Kabupaten Pasuruan mengadopsi standar Jasaboga Golongan B sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 1096/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga. Hal ini mutlak diperlukan mengingat volume produksi yang masif (>3.000 porsi/hari) memiliki risiko kontaminasi yang tinggi jika tidak dikelola dengan sistematis.

Arsitektur bangunan menerapkan prinsip "Alur Satu Arah" (One-Way Flow) untuk mencegah kontaminasi silang (cross-contamination) antara bahan mentah dan makanan matang. Zonasi ruang dibagi secara ketat menjadi:

- Zona Penerimaan & Kotor (Receiving & Dirty Zone):** Area tempat bahan baku dari supplier (sayur tanah, daging mentah, ikan) diterima, disortir (quality control), dan dicuci. Area ini dilengkapi dengan bak cuci stainless steel standar industri.
- Zona Penyimpanan (Storage Zone):** Terdiri dari gudang kering (dry storage) untuk beras/bumbu dan gudang dingin (Cold Storage) dengan suhu terkontrol (-5°C s.d -10°C) untuk menjaga kesegaran protein hewani sesuai standar rantai dingin (cold chain).

3. Zona Produksi Bersih (Clean Production Zone): Area inti memasak yang wajib steril. Petugas di zona ini wajib menggunakan APD lengkap (masker, hairnet, apron, sarung tangan). Lantai menggunakan material epoksi atau keramik non-pori yang mudah dibersihkan dan tidak menyerap bakteri.
4. Zona Pengemasan & Distribusi (Packaging & Dispatch): Ruang isolasi tempat makanan matang dimasukkan ke dalam wadah (ompeng/kotak makan) sebelum dimuat ke armada distribusi.

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar (AMDAL), infrastruktur SPPG juga dilengkapi dengan sistem utilitas modern:

1. Sistem Tata Udara: Penggunaan Exhaust Hood industri di setiap titik kompor untuk membuang panas dan asap, menjaga suhu ruang kerja tetap ergonomis bagi juru masak.
2. Pengolahan Limbah Cair: Instalasi Grease Trap (Penangkap Lemak) berkapasitas besar pada saluran pembuangan air cucian. Alat ini berfungsi memisahkan minyak/lemak sisa masakan agar tidak menyumbat saluran drainase kota maupun mencemari air tanah warga.
3. Sterilisasi Peralatan: Fasilitas pencucian alat makan massal menggunakan metode perendaman air panas suhu 80°C atau larutan kaporit 50 ppm untuk menjamin alat makan bebas dari bakteri E. coli dan Salmonella sebelum digunakan kembali oleh siswa esok harinya.

3.3 Mekanisme Pendanaan dan Pengelolaan Aset

Pelaksanaan program strategis nasional dengan skala masif dan kompleksitas tinggi seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) menuntut adanya struktur pendanaan yang tidak hanya kokoh, tetapi juga transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Mengingat besarnya kebutuhan investasi awal (initial investment) yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dapur modern berstandar sanitasi tinggi, serta besarnya biaya operasional harian untuk penyediaan bahan baku pangan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyadari bahwa beban ini tidak dapat ditanggung secara parsial. Oleh karena itu, diterapkanlah strategi pembiayaan hibrida (blended finance) yang secara cerdas menyinergikan kapasitas fiskal Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) sebagai penyokong utama dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pendamping strategis.

Sinergitas finansial ini bukan sekadar mekanisme pembagian beban biaya (cost-sharing) semata, melainkan merupakan manifestasi nyata dari prinsip gotong royong antar-tingkat pemerintahan (intergovernmental fiscal cooperation). Dalam skema ini, APBN difokuskan pada belanja modal skala besar (Capital Expenditure) seperti konstruksi fisik dan peralatan, sementara APBD difokuskan pada fasilitas kewilayahan yang bersifat pendukung. Pendekatan ini dirancang untuk menjamin keberlanjutan program jangka panjang tanpa menimbulkan guncangan fiskal (fiscal shock) yang dapat mengganggu pos belanja prioritas daerah lainnya, seperti pendidikan rutin dan kesehatan dasar yang tetap harus berjalan.

Landasan yuridis yang menjadi payung hukum utama bagi keterlibatan aktif Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam skema pendanaan ini mengacu secara ketat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Regulasi ini bukan sekadar himbauan, melainkan memberikan mandat imperatif yang mengikat secara hukum bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan dukungan anggaran (mandatory support) untuk pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program prioritas nasional. Keberadaan regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam merencanakan alokasi dana tanpa keraguan akan potensi pelanggaran administrasi di kemudian hari.

Secara lebih spesifik, dalam klausul Lampiran halaman 166 poin 5.3.2 Permendagri tersebut, disebutkan secara eksplisit bahwa dukungan anggaran daerah harus dialokasikan pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan daerah, dengan besaran yang disesuaikan secara proporsional terhadap kemampuan keuangan daerah (fiscal capacity). Klausul ini menegaskan bahwa otonomi daerah tetap dihormati dalam pelaksanaan program nasional, di mana daerah diberikan ruang diskresi untuk mengatur besaran dukungan sesuai dengan kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer yang diterima, sehingga tidak terjadi pemaksaan anggaran yang berpotensi menyebabkan defisit.

Implikasi teknis dari regulasi ini sangat signifikan bagi tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Pasuruan. Pemerintah Daerah dituntut untuk memiliki agilitas

atau kelincahan anggaran (budgetary agility) dalam merespons dinamika kebutuhan program yang bergerak cepat. Apabila alokasi anggaran untuk dukungan MBG belum terakomodasi secara penuh dalam nomenklatur APBD murni Tahun Anggaran 2025, maka mekanisme teknokratis yang ditempuh adalah melakukan pergeseran anggaran (refocusing) dan realokasi belanja. Langkah ini dilakukan secara prosedural melalui mekanisme Perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mendahului Perubahan APBD (PAK), sebuah instrumen legal yang diperbolehkan dalam keadaan mendesak atau prioritas nasional.

Langkah taktis penerbitan Perkada mendahului PAK ini diambil bukan tanpa alasan. Strategi ini merupakan bentuk mitigasi risiko untuk memastikan bahwa persiapan teknis di lapangan mulai dari penyiapan lahan (land clearing), pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), hingga perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak terhambat oleh siklus birokrasi pengesahan anggaran yang kaku dan memakan waktu lama. Dengan demikian, ketersediaan dana taktis untuk pra-operasional dapat tersedia tepat waktu (just-in-time), memastikan bahwa infrastruktur siap digunakan segera setelah dana konstruksi dari pusat turun, sehingga target layanan makan bergizi bagi siswa dapat terealisasi sesuai jadwal nasional.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 15 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA. 2025
(LAMPIRAN HALAMAN 166 ; 5.3.2 BIDANG PENDIDIKAN ; HURUF (d))**

- d. Dalam rangka pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program prioritas nasional, pemerintah daerah memedomani:
- 1) mengalokasikan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD TA 2025 pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - 2) dalam hal alokasi anggaran Makan Bergizi Sehat bersumber dari transfer keuangan daerah yang mewajibkan kontribusi dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBD TA 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan.
 - 3) dalam hal pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program prioritas nasional belum dianggarkan dalam APBD TA 2025, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2025, dengan cara merubah Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025, dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD, yang selanjutnya ditampung pada Perubahan APBD TA 2025 bagi daerah yang melaksanakan perubahan APBD TA 2025 dan dilaporkan dalam LRA bagi daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

Gambar 3.3 Kutipan Regulasi Permendagri No. 15 Tahun 2024

Untuk menghindari tumpang tindih (overlapping) pembiayaan yang berpotensi menjadi temuan audit, pembagian peran antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dipetakan secara tegas dalam skema Cost-Sharing. Berdasarkan arahan teknis dari BGN, struktur pembiayaan dibagi berdasarkan karakteristik belanja, yakni antara Belanja Modal (Capital Expenditure/CAPEX) dan Belanja Penunjang.

Badan Gizi Nasional (BGN) memegang porsi mayoritas dalam pembiayaan aset fisik utama. Dengan dukungan total anggaran nasional mencapai Rp 71 Triliun, BGN bertanggung jawab penuh atas biaya konstruksi fisik bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengadaan peralatan dapur industrial (industrial kitchen appliances), peralatan makan siswa, furnitur operasional, hingga prasarana pendukung sterilisasi. Hal ini bertujuan untuk menjamin standarisasi kualitas. Artinya, kualitas bangunan dapur di Pasuruan akan setara dengan standar nasional, karena didanai dan diawasi langsung oleh pusat melalui konsultan manajemen konstruksi.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memegang peran vital sebagai fasilitator kewilayahan. Tanggung jawab pembiayaan daerah difokuskan pada penyediaan lahan siap bangun (land clearing), pengurusan perizinan bangunan (PBG dan SLF) agar legalitas gedung terjamin, serta koordinasi lintas sektor. Pemkab Pasuruan memastikan bahwa lahan yang diserahkan dalam kondisi "clean and clear", baik secara fisik maupun administratif, sehingga BGN dapat langsung melakukan konstruksi tanpa hambatan sengketa lahan.

Tabel 3.2 Skema Pembagian Tanggung Jawab Pembiayaan Program MBG

Komponen Pembiayaan	Sumber Dana	Keterangan
Konstruksi Fisik Gedung SPPG	APBN (BGN)	Termasuk struktur, mekanikal, elektrik
Peralatan Dapur & Alat Makan	APBN (BGN)	Standar Food Grade & Higienis
Penyediaan Lahan	APBD (Pemkab)	Skema Pinjam Pakai Aset
Perizinan (PBG/SLF)	APBD (Pemkab)	Fasilitasi Dinas Teknis terkait
Perencanaan & Pengawasan	APBN (BGN)	Tim Konsultan MK Pusat

Aspek krusial yang menjadi perhatian khusus dalam Bab ini adalah status kepemilikan aset tanah tempat berdirinya SPPG. Mengingat bangunan SPPG

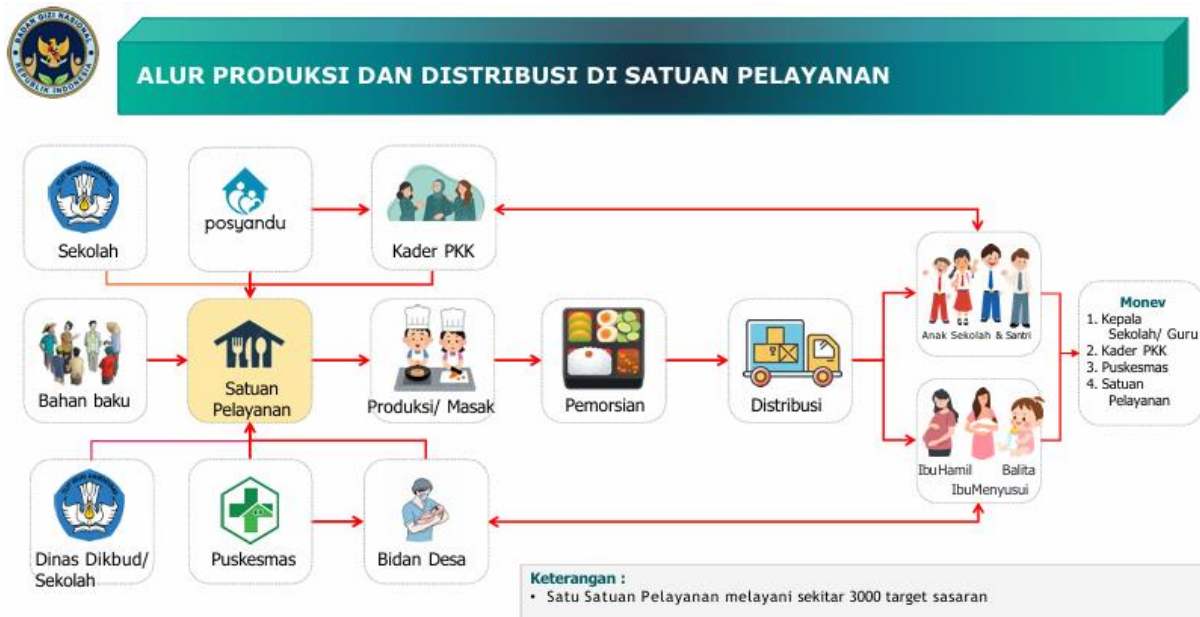
didirikan di atas tanah milik Pemerintah Daerah namun operasionalnya di bawah kendali Badan Gizi Nasional, maka instrumen hukum yang digunakan adalah Pinjam Pakai Barang Milik Daerah (BMD).

Mekanisme ini dipilih karena dinilai paling aman dan strategis. Dalam skema ini, hak kepemilikan tanah tetap berada di tangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (tercatat dalam Neraca Aset Daerah), namun hak pemanfaatan diserahkan kepada Satuan Pelayanan BGN untuk jangka waktu tertentu (misalnya 5 tahun dan dapat diperpanjang). Hal ini memberikan keuntungan ganda: bagi BGN, mereka tidak perlu mengeluarkan anggaran pembelian tanah yang sangat mahal; sedangkan bagi Pemkab Pasuruan, aset daerah menjadi lebih produktif dan terawat tanpa kehilangan hak kepemilikan.

Proses administrasi Pinjam Pakai ini melibatkan verifikasi ketat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Setiap jengkal tanah yang digunakan seperti lahan seluas 3.187 m² di Bangil dan lahan di belakang Koramil Kraton wajib memiliki sertifikat yang sah dan bebas dari sengketa. Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan aset ini kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) operasional, yang menjadi dokumen legal standing bagi auditor negara dalam memeriksa akuntabilitas penggunaan kekayaan negara. Dengan tata kelola aset yang tertib administrasi ini, Program MBG di Kabupaten Pasuruan tidak hanya sukses dalam penyaluran makanan, tetapi juga sukses dalam tertib administrasi pemerintahan.

3.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Produksi dan Distribusi

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pasuruan tidak dijalankan secara parsial, melainkan melalui sebuah ekosistem alur kerja yang terintegrasi penuh (fully integrated workflow). Sistem ini dirancang untuk menghubungkan rantai pasok dari hulu (penyediaan bahan) hingga ke hilir (penerima manfaat) dengan mekanisme kontrol yang ketat. Berbeda dengan model katering konvensional, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pasuruan menerapkan protokol zonasi waktu dan pemorsian presisi demi menjamin ketepatan gizi bagi sekitar 3.000 target sasaran per satuan pelayanan.



Gambar 3.4 Alur Produksi dan Distribusi Kabupaten Pasuruan

A. Peta Alur Koordinasi dan Produksi (Workflow Ecosystem)

Sistem operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pasuruan dirancang bukan sebagai aktivitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sebuah ekosistem kerja yang dimulai dari tahap perencanaan matang dan validasi data yang melibatkan sinergi lintas sektoral. Prinsip dasar yang dipegang adalah "Zero Exclusion", yang berarti memastikan tidak ada satupun sasaran penerima manfaat yang terlewat dari layanan ini. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat dua jalur koordinasi utama yang mengalir secara simultan dan bermuara ke Satuan Pelayanan sebagai pusat komando (Command Center) operasional.

Jalur pertama adalah Jalur Pendidikan dan Kemasyarakatan, yang berfokus pada pemutakhiran data penerima manfaat secara harian (daily dynamic data). Pada jalur ini, proses validasi data siswa dilakukan secara berjenjang dan ketat, dimulai dari tingkat Sekolah oleh guru kelas, dikonfirmasi melalui data Posyandu, hingga diverifikasi oleh jejaring Kader PKK di tingkat desa. Fungsi strategis jalur ini adalah untuk memetakan kebutuhan riil di lapangan setiap harinya misalnya, mendata siswa yang absen atau sakit sehingga jumlah produksi makanan dapat disesuaikan secara presisi untuk meminimalisir pemborosan pangan (food waste).

Jalur kedua adalah Jalur Kesehatan dan Pemerintahan, yang berperan sebagai penjamin standar mutu dan kelayakan intervensi gizi. Jalur ini melibatkan kolaborasi teknis antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) selaku pemegang data pokok pendidikan, Puskesmas selaku otoritas kesehatan wilayah, serta Bidan Desa sebagai garda terdepan kesehatan ibu dan anak. Peran Bidan Desa di sini dinilai sangat krusial dan tak tergantikan, khususnya dalam memverifikasi data kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Verifikasi medis ini penting agar intervensi gizi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan fisiologis penerima manfaat dan tepat sasaran dalam menanggulangi risiko stunting.

Secara fisik, implementasi di lapangan diterjemahkan ke dalam alur produksi di SPPG yang bergerak secara linear satu arah (one-way flow) untuk menjamin efisiensi kerja dan standar hygiene tertinggi. Siklus ini dimulai dari tahap Input Bahan Baku (Inbound Logistics), di mana komoditas segar seperti sayur mayur, lauk pauk, dan bahan pokok disuplai oleh mitra agregator lokal (Koperasi/BUMDes) ke area penerimaan barang. Di titik ini, petugas melakukan pemeriksaan kualitas (Quality Control) untuk memastikan bahan yang masuk segar dan layak olah. Bahan yang lolos seleksi kemudian masuk ke zona Satuan Pelayanan sebagai pusat kegiatan untuk melalui proses penyortiran, pencucian, dan persiapan awal (mise en place).

Tahap selanjutnya adalah jantung dari operasional, yaitu Produksi (Dapur Umum). Di zona ini, proses pengolahan dilakukan oleh juru masak terlatih dengan mematuhi protokol sanitasi yang ketat. Setelah makanan matang sempurna, produk tidak langsung dikirim, melainkan masuk ke tahap Pemorsian (Portioning). Pada tahap ini, makanan ditakar menggunakan timbangan digital sesuai standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang ditetapkan ahli gizi. Rangkaian panjang ini diakhiri dengan tahap Distribusi, di mana armada logistik bergerak cepat mengantarkan paket makanan ke empat kelompok penerima manfaat prioritas: Anak Sekolah/Santri, Ibu Hamil, Balita, dan Ibu Menyusui, memastikan asupan gizi sampai dalam kondisi hangat dan tepat waktu.

B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemorsian



Gambar 3.5 Pemorsian dan Pendistribusian MBG Kabupaten Pasuruan

Tahap pemorsian (plating) merupakan fase kritis dalam manajemen mutu SPPG Kabupaten Pasuruan. Pada tahap ini, makanan bukan sekadar dibagi rata, melainkan ditakar dengan presisi untuk memastikan setiap gram makanan yang masuk ke tubuh penerima manfaat memiliki nilai gizi yang terukur. Proses pemorsian dilaksanakan dengan mematuhi lima langkah standar yang ketat:

- Protokol Sanitasi Penjamah Makanan: Sebelum menyentuh area kerja, petugas pemorsian wajib melakukan sterilisasi diri dengan mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik di bawah air mengalir. Selain itu, petugas wajib mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap yang terdiri dari masker medis untuk menutup mulut dan hidung, serta apron/celemek bersih untuk mencegah kontaminasi dari pakaian.
- Persiapan Instrumen Kerja: Petugas menyiapkan peralatan pemorsian yang telah disterilisasi, meliputi centong saji, penjepit makanan (food tong), dan wadah saji yang bersih.
- Verifikasi Makanan Siap Saji: Makanan yang telah matang dicek kembali kondisi fisiknya (suhu dan kesegaran) sebelum mulai diporsikan.
- Penimbangan Presisi (Kunci Mutu): Inilah langkah pembeda utama. Penentuan porsi tidak dilakukan dengan perkiraan visual ("kira-kira"), melainkan wajib menggunakan timbangan digital. Hal ini dilakukan untuk

memastikan bobot nasi, lauk hewani, dan sayur sesuai dengan standar kalori yang ditetapkan oleh Ahli Gizi.

- e. Pengisian Wadah (Plating): Makanan yang telah ditimbang kemudian ditata rapi ke dalam baki makan (omprenng) berbahan stainless steel tipe 304/430. Penggunaan wadah stainless ini dipilih karena sifatnya yang food grade, tahan panas, dan tidak meluruhkan bahan kimia berbahaya. Setelah terisi lengkap, wadah ditutup rapat untuk menjaga suhu dan higiene selama perjalanan.

C. Manajemen Distribusi Tiga Gelombang (The 3-Cluster Schedule)

Guna memastikan makanan diterima dalam kondisi hangat dan tepat waktu sesuai jam makan biologis sasaran, Kabupaten Pasuruan menerapkan strategi distribusi berbasis kloter waktu (time-cluster strategy). Pengiriman dibagi menjadi tiga gelombang keberangkatan armada:

- a. KLOTER 1 (Pukul 07.45 WIB): Armada pertama diberangkatkan pagi hari dengan prioritas tujuan ke jenjang pendidikan usia dini dan dasar kelas rendah, meliputi TK, PAUD, RA (Raudhatul Athfal), dan SD Kelas 1-2. Jadwal ini disesuaikan dengan jam istirahat pertama siswa kelas rendah yang cenderung lebih awal.
- b. KLOTER 2 (Pukul 09.00 WIB): Gelombang kedua difokuskan untuk melayani siswa jenjang SD Kelas 3 sampai Kelas 6. Pengaturan jeda waktu ini memungkinkan armada logistik untuk melakukan rotasi pengantaran tanpa terjadi penumpukan di satu waktu, sehingga layanan tetap prima.
- c. KLOTER 3 (Pukul 10.00 WIB): Gelombang terakhir memiliki cakupan layanan terluas dengan dua jalur distribusi paralel:
 - i. Jalur Pendidikan Menengah: Mengirimkan makan siang untuk siswa jenjang SMP dan SMA/SMK, menyesuaikan dengan jam istirahat siang mereka.
 - ii. Jalur Khusus (Door-to-Door): Tim distribusi khusus menggunakan armada motor (roda dua/tiga) bergerak menyasar kelompok rentan di masyarakat, yaitu Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita. Makanan diantar langsung ke titik kumpul Posyandu atau bahkan langsung ke rumah penerima manfaat (home delivery) untuk

memastikan aksesibilitas bagi ibu dan balita yang mungkin memiliki keterbatasan mobilitas.

D. Sistem Monitoring dan Evaluasi Kolaboratif (Monev)

Guna menjamin akuntabilitas publik dan transparansi pelaksanaan program yang melibatkan anggaran negara dalam jumlah besar, fungsi pengawasan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pasuruan tidak didesain secara sentralistik atau hanya diserahkan kepada satu pihak semata. Sebaliknya, sistem pengawasan dilaksanakan secara gotong royong melalui mekanisme "Pengawasan Berlapis" (Multilayer Supervision System). Pendekatan ini dipilih untuk menciptakan mekanisme checks and balances yang efektif, di mana setiap celah potensi penyimpangan dapat dideteksi sejak dini oleh berbagai elemen yang terlibat dalam ekosistem program. Pengawasan ini tidak hanya berorientasi pada aspek administratif keuangan, tetapi juga mencakup aspek kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Di lini terdepan sektor pendidikan, Kepala Sekolah dan Guru memegang mandat krusial sebagai pengawas internal di satuan pendidikan (Otoritas Titik Serah). Peran mereka tidak sebatas menerima kiriman, melainkan melakukan verifikasi faktual saat serah terima logistik pangan. Kepala Sekolah dan tim guru yang ditunjuk berkewajiban memeriksa kesesuaian jumlah porsi yang datang dengan data absensi siswa hari tersebut, serta melakukan uji organoleptik sederhana (memastikan makanan tidak basi, tidak berbau menyengat, dan layak konsumsi) sebelum dibagikan. Langkah ini dituangkan dalam penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) harian yang menjadi dokumen sah pembayaran.

Lebih lanjut, peran guru juga meluas hingga ke aspek pengawasan konsumsi. Guru memastikan bahwa makanan tersebut benar-benar dikonsumsi oleh siswa di sekolah (on-site feeding) dan tidak dibawa pulang, guna menjamin asupan kalori yang ditargetkan benar-benar masuk ke tubuh anak. Momen makan bersama ini juga dimanfaatkan sebagai media edukasi gizi dan penanaman karakter disiplin bagi siswa. Laporan sisa makanan (food waste) juga dicatat sebagai bahan evaluasi preferensi menu, sehingga menu

yang kurang disukai siswa dapat segera diganti atau dimodifikasi oleh dapur produksi.

Bergeser ke lini kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jejaring Bidan Desa memiliki peran strategis dalam memantau dampak (outcome) jangka panjang program. Fokus monitoring mereka bukan pada operasional harian, melainkan pada indikator kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan secara berkala melakukan pengukuran antropometri (berat badan dan tinggi badan) untuk memantau grafik pertumbuhan anak serta melakukan screening kadar hemoglobin untuk mendeteksi anemia. Data medis ini kemudian disandingkan dengan data asupan program MBG untuk mengukur efektivitas intervensi gizi terhadap penurunan angka stunting dan peningkatan status gizi siswa di wilayah kerja masing-masing.

Sementara itu, di lini masyarakat yang menyasar kelompok rentan di luar sekolah, Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memegang peran vital sebagai ujung tombak pengawasan distribusi jalur khusus. Mengingat sasaran jalur ini adalah Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita yang tersebar di rumah-rumah penduduk, Kader PKK yang memiliki penguasaan wilayah mikro di desa-desa bertugas memastikan distribusi door-to-door berjalan lancar. Mereka memverifikasi bahwa paket makanan tambahan benar-benar sampai ke tangan ibu hamil yang berhak dan tidak salah sasaran (mistargeting). Pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Kader PKK juga efektif untuk memastikan kepatuhan konsumsi di lingkungan keluarga.

Seluruh temuan data, keluhan, dan catatan insiden dari para pengawas lapangan baik dari sekolah, Puskesmas, maupun Kader PKK kemudian dilaporkan secara terintegrasi kembali ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Data ini diolah menjadi bahan evaluasi harian (Daily Evaluation Report) bagi Manajer Unit SPPG. Dengan struktur pengawasan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah secara partisipatif ini, siklus perbaikan kualitas layanan dapat berjalan cepat. Potensi penyimpangan, baik berupa pengurangan takaran maupun penurunan kualitas rasa, dapat diminimalisir sekecil mungkin, sehingga kepercayaan publik terhadap integritas program dapat terus terjaga dan ditingkatkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Pasuruan kini telah mengalami evolusi signifikan, bertransformasi dari sekadar tataran wacana konseptual dan perencanaan administratif menjadi serangkaian langkah taktis operasional yang terukur dan substantif di lapangan. Pergeseran paradigma ini menandai komitmen serius pemerintah daerah dalam menerjemahkan visi nasional ke dalam aksi nyata yang berdampak langsung pada masyarakat.

Bab ini disusun untuk menguraikan secara komprehensif hasil-hasil konkret yang diperoleh dari maraton koordinasi strategis serta rangkaian survei kelayakan teknis yang intensif. Seluruh data dan temuan yang dipaparkan merupakan buah dari sinergi kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait (multi-stakeholders), yang telah bekerja secara simultan untuk memastikan kesiapan ekosistem program dari hulu ke hilir.

Secara spesifik, fokus pembahasan utama dalam bab ini akan membedah tiga pilar krusial fondasi program. Pertama, analisis mendalam mengenai kesiapan infrastruktur kelembagaan untuk menjamin tata kelola yang akuntabel. Kedua, pelaksanaan uji tuntas (due diligence) yang ketat terhadap aspek fisik, lingkungan, dan legalitas lokasi dapur produksi. Ketiga, pemetaan demografis yang presisi terhadap sasaran penerima manfaat di klaster-klaster prioritas guna meminimalisir exclusion error.

Seluruh sajian data dalam bab ini merupakan fakta empiris hasil verifikasi faktual di lapangan dan konsolidasi lintas sektor yang telah divalidasi. Informasi ini tidak hanya berfungsi sebagai laporan status terkini, melainkan disusun sebagai landasan fundamental (evidence-based) bagi perumusan kebijakan teknis selanjutnya, memastikan setiap keputusan investasi dan operasional yang diambil memiliki pijakan data yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.1 Konsolidasi Kelembagaan dan Sinergi Lintas Sektor

Langkah awal yang krusial dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke tingkat daerah adalah peletakan fondasi institusional yang kokoh. Sebagai tindak lanjut dari Surat Bupati Pasuruan Nomor 00.7/1837/424.101/2025 tertanggal 16 Juli 2025 perihal Usulan Lahan untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Pemerintah Kabupaten Pasuruan bergerak cepat dengan menggelar Rapat Koordinasi Strategis pada hari Kamis, 7 Agustus 2025.

Pertemuan yang diinisiasi oleh Bappelitbangda ini bukan sekadar forum administratif biasa, melainkan sebuah momentum penyatuan persepsi dan konsolidasi sumber daya (resource consolidation) antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), rapat ini menghasilkan keputusan strategis berupa pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan MBG Kabupaten Pasuruan. Satgas ini dirancang sebagai adhoc body yang memiliki mandat khusus untuk mengawal akselerasi program, mulai dari fase perencanaan, konstruksi, hingga operasional.

A. Analisis Komposisi Pemangku Kepentingan (Stakeholder Analysis)

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menyukseskan program ini tercermin dari komposisi peserta rapat yang merepresentasikan pendekatan holistic governance. Berdasarkan daftar hadir dan notulensi rapat, terlihat adanya sinergi pentahelix yang melibatkan berbagai klaster kewenangan:

- a. Klaster Perencanaan dan Anggaran: Kehadiran Bappelitbangda dan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menegaskan bahwa program ini telah masuk dalam arus utama perencanaan pembangunan daerah. Peran kedua instansi ini vital dalam memastikan ketersediaan ruang fiskal (fiscal space) dan keselarasan program dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga dukungan anggaran pendamping dari APBD dapat dieksekusi tanpa melanggar regulasi keuangan.
- b. Klaster Infrastruktur dan Utilitas Vital: Pelibatan instansi teknis seperti Dinas SDA Cipta Karya, Dinas Bina Marga, serta penyedia utilitas publik (PDAM dan PLN Wilayah Pasuruan) mengindikasikan pemahaman

mendalam bahwa operasional Dapur SPPG adalah kegiatan industri yang membutuhkan daya dukung infrastruktur tinggi. Kehadiran PLN dan PDAM sejak fase awal menjamin bahwa kebutuhan listrik tegangan tinggi untuk peralatan dapur modern (industrial kitchen appliances) dan suplai air bersih ribuan liter per hari dapat terpenuhi tanpa hambatan teknis.

- c. Klaster Pengawasan dan Akuntabilitas: Yang menarik dan patut digarisbawahi adalah pelibatan Inspektorat Daerah sejak tahap perencanaan ("Day One"). Langkah ini merupakan mitigasi risiko dini untuk memastikan seluruh proses, mulai dari pengadaan lahan hingga konstruksi, berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Hal ini bertujuan mencegah potensi temuan audit atau penyimpangan administrasi di kemudian hari.
- d. Klaster Teknis Operasional: Dinas terkait sasaran program, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, hadir untuk menyinkronkan data sasaran siswa dan standar gizi. Sinergi antara Dikbud (sekolah umum) dan Kemenag (madrasah/pesantren) memastikan prinsip inklusivitas program, di mana santri dan siswa umum mendapatkan perlakuan setara.

B. Legalisasi Tim Pelaksana

Output konkret dari konsolidasi ini adalah penyusunan Draf Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pembentukan Satgas MBG. Regulasi ini akan menjadi payung hukum (legal standing) bagi Tim Teknis di lapangan untuk bekerja secara agile. Selain itu, rapat juga menyepakati penunjukan tenaga ahli profesional, Sdr. Gilang Krisna Wijaya, ST, sebagai koordinator teknis lapangan yang akan menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Penunjukan tenaga ahli ini menunjukkan bahwa manajemen program dikelola secara teknokratis dengan mengedepankan kompetensi spesifik di bidang infrastruktur dan manajemen proyek.

4.2 Analisis Geospasial dan Kelayakan Teknis Lokasi SPPG

Sebagai langkah tindak lanjut taktis dari rapat koordinasi awal, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Tim Teknis Gabungan melaksanakan survei lapangan (site visit) secara maraton pada hari Jumat, 8 Agustus 2025. Survei ini bertujuan untuk melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap aspek fisik, legalitas, dan lingkungan dari calon lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diusulkan.

Tim survei terdiri dari unsur lintas sektoral yang meliputi Bappelitbangda, Dinas Perkim/Pertanahan, Dinas Bina Marga, Dinas SDA, Satpol PP, serta unsur kewilayahan (Camat dan Kepala Desa setempat). Pendekatan kolaboratif ini dimaksudkan untuk membedah kelayakan lokasi dari berbagai perspektif secara simultan, mulai dari kesesuaian tata ruang hingga potensi konflik sosial.

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, berikut adalah analisis mendalam terhadap tiga lokasi prioritas:

1. Klaster Wilayah Timur: Analisis Site Gratitunon (Kecamatan Grati)
 - a. Dimensi dan Status Aset: Lahan yang diusulkan merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan status legalitas Sertifikat Hak Milik (SHM) yang clean and clear. Keunggulan utama lokasi ini adalah luasannya yang sangat ekspansif, mencapai $\pm 23.310 \text{ m}^2$ dengan dimensi panjang 180 meter dan lebar 124 meter. Luasan yang masif ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi arsitek untuk merancang layout dapur modern yang ideal, mencakup area loading dock, gudang logistik terpisah, hingga instalasi pengolahan limbah (IPAL) yang memadai tanpa terkendala keterbatasan lahan.
 - b. Dukungan Utilitas Vital: Dari sisi infrastruktur dasar, lokasi ini memiliki keunggulan komparatif berupa ketersediaan sumber air baku yang melimpah. Tim menemukan adanya sumber air permukaan dengan dimensi 6x2 meter di lokasi. Mengingat operasional dapur skala industri membutuhkan ribuan liter air per hari untuk proses pencucian dan sanitasi, keberadaan sumber air alami ini merupakan aset strategis untuk efisiensi biaya operasional jangka panjang. Selain itu, jaringan listrik PLN dan akses internet juga sudah tersedia di titik ini.

- c. Tantangan Rekayasa Sipil dan Mitigasi: Meskipun memiliki luasan ideal, tim survei mencatat adanya tantangan topografi yang signifikan. Elevasi permukaan tanah berada sekitar 1 meter di bawah permukaan jalan raya. Selain itu, terdapat saluran drainase sekunder yang cukup lebar memisahkan bahu jalan dengan lahan. Strategi Mitigasi: Untuk mengatasi hal ini, diperlukan intervensi rekayasa sipil (civil engineering intervention) berupa pekerjaan pengurugan dan pemadatan tanah (landfill) agar elevasi dapur aman dari risiko genangan air. Selain itu, Dinas Bina Marga merekomendasikan pembangunan jembatan akses (box culvert) dengan spesifikasi tonase berat agar mampu dilalui oleh truk logistik pengangkut bahan baku.

2. Klaster Ibu Kota: Analisis Site Gempeng (Kecamatan Bangil)

Lokasi ketiga yang disurvei berada di Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil. Sebagai ibu kota kabupaten, Bangil merupakan pusat aglomerasi sekolah dengan kepadatan siswa tertinggi.

Meskipun detail teknis spesifik masih dalam tahap finalisasi pengukuran, pemilihan lokasi Gempeng merepresentasikan strategi "Mendekatkan Produksi ke Konsumen". Dengan menempatkan SPPG di pusat kota, waktu tempuh distribusi ke sekolah-sekolah padat karya di wilayah Bangil dan sekitarnya dapat dipangkas signifikan, menjaga suhu makanan tetap hangat saat diterima siswa (sesuai standar "20 Menit Distribusi"). Lokasi ini juga dinilai strategis karena dekat dengan pusat kendali pemerintahan, memudahkan fungsi pengawasan dan monitoring harian oleh Satgas Kabupaten.

4.3 Analisis Kapasitas Layanan dan Target Sasaran (Catchment Area)

Analisis kapasitas layanan berdasarkan rekapitulasi data riil penerima manfaat menunjukkan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Klaster Gondang Wetan (Lapangan Gayam) akan beroperasi sebagai Sentra Produksi Utama (Major Production Hub). Berbeda dengan proyeksi awal, data pemetaan terbaru mencatat bahwa fasilitas ini tidak hanya melayani siswa pendidikan dasar, tetapi juga mencakup jenjang menengah atas dan kelompok rentan lintas wilayah dengan volume yang masif.

1. Beban Layanan Sektor Pendidikan (SD, SMP, dan SMA)

Tabel 4.1 Data Jumlah Penerima Manfaat dengan Kategori SMA/Sederajat

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SISWA
1	Kelurahan Gratitunon – Kecamatan Grati	1. SMAS SYARIF HIDAYATULLAH 2. SMKN 1 GRATI 3. SMKS DARUL ULUM REBALAS GRATI 4. SMKS KARTIKA GRATI 5. SMK DARUL MURTADLO 6. SMAN 1 GRATI 7. SMK KESEHATAN BHAKTI BANGSA M 8. SMKN 1 NGULING 9. SMA TERPADU BUMI DARUN NAJAH 10. SMK MUHAMMADIYAH 2 11. SMK NAHDLATUL ULAMA LEKOK	56 1992 153 29 43 1197 59 770 91 150 88
JUMLAH TOTAL			4628
2	Kelurahan Gempeng – Kecamatan Bangil	1. SLB BC NUSANTARA BANGIL 2. SMA AL AZIZ BANGIL 3. SMA NEGERI 1 BANGIL 4. SMA NEGERI TARUNA MADANI JATIM 5. SMAS ISLAM DARUT TAUHID BANGIL 6. SMAS MUHAMMADIYAH 2 BANGIL 7. SMAS YADIKA BANGIL 8. SMKN 1 BANGIL 9. SMKS AHMAD YANI BANGIL 10. SMKS AL MADINAH 11. SMKS DARUT TAUHID BANGIL 12. SMKS WAHID HASYIM BANGIL 13. SMKS YADIKA 1 BANGIL	21 254 959 293 57 21 257 1975 237 57 54 62 544
JUMLAH TOTAL			4791
3	Lapangan Gayam – Kec. Gondang Wetan	1. SMAN 1 GONDANGWETAN 2. SMKS SABILILLAH 3. SMKS QUEEN ZAM ZAM 4. SLBN BANDARAN III 5. SMKN WINONGAN	1096 509 158 124 1250
JUMLAH TOTAL			3137

Tabel 4.2 Data Jumlah Penerima Manfaat dengan Kategori SD/SMP

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SISWA
1	Kelurahan Gratitunon – Kecamatan Grati	1. SMP DARUL ULUM 5 REBALAS 2. SDN REBALAS I GRATI 3. SDN REBALAS II GRATI 4. SDN CUKURGONDANG I GRATI 5. SDN GRATI I GRATI 6. SDN GRATI II GRATI 7. SDN KEBONREJO I GRATI 8. SDN KALIPANG I GRATI 9. SDN KALIPANG II GRATI 10. SDN KAMBINGANREJO GRATI 11. SDN KARANGKLIWON GRATI 12. SDN RANUKLINDUNGAN I GRATI 13. SDN RANUKLINDUNGAN II GRATI 14. SDN SUMBERAGUNG I GRATI 15. SDN TREWUNG GRATI 16. SMPN 2 GRATI	225 159 165 176 326 138 190 182 305 191 168 137 177 185 203 736
	JUMLAH TOTAL		3663
2	Kelurahan Gempeng – Kecamatan Bangil	1. SDN GEMPENG I BANGIL 2. SMP YADIKA BANGIL 3. SDN KERSIKAN I BANGIL 4. SDN KERSIKAN II BANGIL 5. SD ISLAM AL HUDA 6. SD MUHAMMADIYAH BANGIL 7. SD PLUS MUTIARA ILMU BOARDING SCHOOL BANGIL 8. SD NAHDLATUL ULAMA BANGIL 9. SD AL-IRSYAD BANGIL 10. SMP MUHAMMADIYAH 2 BANGIL 11. SMP PUTRI DARUT TAUHID BANGIL 12. SMPN 2 BANGIL 13. SMPN 3 BANGIL	282 184 238 113 53 466 83 361 149 70 62 970 765

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SISWA
JUMLAH TOTAL			3796
3	Lapangan Gayam – Kec. Gondang Wetan	1. SDN BAJANGAN GONDANGWETAN 2. SDN GAYAM I GONDANGWETAN 3. SDN GONDANGWETAN I 4. SDN GONDANGWETAN II 5. SDN KALIREJO GONDANGWETAN 6. SDN KARANGSENTUL I 7. SDN KERSIKAN GONDANGWETAN 8. SDN LAJUK GONDANGWETAN 9. SDN SEKARPUTIH 10. SDN WONOSARI GONDANGWETAN 11. SMPN 1 GONDANGWETAN 12. SMPN 2 GONDANGWETAN 13. SMPP AL AZHAR	252 158 263 49 160 501 195 90 122 233 822 378 121
JUMLAH TOTAL			3344

Tabel 4.3 Data Jumlah Penerima Manfaat dengan Kategori 3B (Bumil, Busui, Balita)

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	PENERIMA MANFAAT		
			IBU HAMIL	IBU BUSUI	BALITA
1	Kelurahan Gratitunon – Kecamatan Grati	1. KARANG LO	55	19	284
		2. REBALAS	125	16	525
		3. PLOSOSARI	120	34	512
		4. GRATI TUNON	88	30	423
		5. KALIPANG	130	45	613
		6. TREWUNG	30	7	130
		7. RANU	46	21	283
		KLINDUNGAN	144	39	680
		8. SUMBER	45	17	300
		DAWESARI			
9. CUKUR GONDANG					
JUMLAH TOTAL			783	228	3750
2	Kelurahan Gempeng – Kecamatan Bangil	1. KOLURSARI	103	36	495
		2. KIDUL DALEM	155	31	741
		3. POGAR	143	32	684
		4. KAUMAN	107	14	509
		5. BENDO MUNGAL	86	15	414
		6. KERSIKAN	98	31	467
		7. GEMPENG	115	31	552
JUMLAH TOTAL			807	190	3862
3	Lapangan Gayam – Kec. Gondang Wetan	1. TEBAS	238	13	45
		2. BRAMBANG	203	21	41
		3. BAYEMAN	283	35	65
		4. KEBON CANDI	155	9	32
		5. TENGGILIS REJO	205	18	42
		6. WONOJATI	242	24	43
		7. WONOSARI	327	34	59
		8. KERSIKAN	183	5	33
		9. KARANG SENTUL	336	49	92
		10. GAYAM	183	23	38
		11. LAJUK	145	6	30
		12. KALIREJO	278	7	61
		13. PATEGUHAN	169	14	39
		14. GROGOL	159	15	31
		15. PEKANGKUNGAN	158	15	38
		16. GONDANGWETAN	294	27	52
		17. RANGGEH	160	21	37
		18. SEKARPUTIH	137	19	32
		19. BAJANGAN	198	17	40
		20. GONDANGREJO	268	18	53
JUMLAH TOTAL			4321	390	903

Berdasarkan tabulasi data sasaran institusi pendidikan, SPPG Gondang Wetan menanggung beban layanan total sebanyak 6.481 siswa setiap harinya. Angka ini merupakan akumulasi dari dua segmen pendidikan utama yang berada dalam radius layanan:

- a. Segmen Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama (SD/SMP): Tercatat sebanyak 3.344 siswa dari 13 sekolah sasaran. Konsentrasi siswa terbesar berada di SMPN 1 Gondangwetan (822 siswa) dan SDN Karangsantul I (501 siswa). Selain itu, layanan juga mencakup sekolah-sekolah di desa penyangga seperti SDN Bajangan (252 siswa), SDN Wonosari (233 siswa), dan SDN Gondangwetan I (263 siswa).
 - b. Segmen Pendidikan Menengah Atas (SMA/SMK): Fasilitas ini juga ditugaskan melayani 3.137 siswa jenjang SMA/SMK. Menariknya, jangkauan layanan meluas hingga ke lintas kecamatan, di mana SMKN Winongan (1.250 siswa) turut menjadi target distribusi utama. Sekolah besar lain yang menjadi beban produksi meliputi SMAN 1 Gondangwetan (1.096 siswa) dan SMKS Sabilillah (509 siswa). Besarnya populasi di segmen ini menuntut manajemen porsi yang berbeda mengingat kebutuhan kalori siswa SMA lebih tinggi dibandingkan siswa SD.
2. Beban Layanan Sektor Masyarakat (Ibu Hamil, Menyusui, dan Balita)
- Selain melayani sekolah, SPPG Gondang Wetan memiliki mandat krusial untuk melayani kelompok rentan di 20 Desa/Kelurahan. Data lapangan menunjukkan angka yang sangat fantastis pada klaster ini, dengan total sasaran mencapai 5.614 penerima manfaat.
- Rincian sasaran kelompok masyarakat meliputi:
- a. Ibu Hamil: Terdata sebanyak 4.321 sasaran (Angka ini tertinggi dibandingkan klaster Grati atau Bangil). Desa Karang Sentul (336), Wonosari (327), dan Gondangwetan (294) menjadi kantong populasi ibu hamil terbesar.
 - b. Balita: Sebanyak 903 balita, dengan konsentrasi di Desa Karang Sentul (92 balita) dan Bayeman (65 balita).
 - c. Ibu Menyusui: Sebanyak 390 sasaran, tersebar merata di desa-desa seperti Karang Sentul (49) dan Bayeman (35).
3. Implikasi Operasional: "Mega Kitchen"

Dengan menggabungkan beban sektor pendidikan (6.481 porsi) dan sektor masyarakat (5.614 porsi), maka Total Kapasitas Produksi Harian SPPG Gondang Wetan menembus angka 12.095 porsi per hari.

Fakta ini mengonfirmasi bahwa Dapur Gayam bukan lagi sekadar dapur tipe industri biasa, melainkan berstatus Mega Kitchen. Skala produksi sebesar ini membawa implikasi teknis serius:

- a. Manajemen Rantai Dingin: Diperlukan Cold Storage berkapasitas minimal 5 ton untuk menyimpan stok protein hewani (daging/ikan) harian.
- b. Armada Logistik: Strategi distribusi "3 Kloter" menjadi harga mati. Pengiriman ke SMKN Winongan (Lintas Kecamatan) harus diprioritaskan dalam rute logistik agar tidak terlambat, sementara distribusi ke 20 desa untuk Ibu Hamil dapat dilakukan menggunakan armada motor roda tiga pada slot waktu yang lebih fleksibel (Kloter 3).

4.4 Kesiapan Infrastruktur Penunjang Vital

Keberhasilan fundamental dari operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bahan baku, melainkan sangat bergantung pada keandalan infrastruktur utilitas dasar sebagai penopang utama. Mengingat karakteristik dapur ini yang akan berfungsi layaknya sebuah pabrik manufaktur pangan modern (food manufacturing plant), standar operasional yang diterapkan menuntut tingkat higiene dan sterilitas yang sangat ketat. Berdasarkan hasil verifikasi faktual di lapangan, aspek ketersediaan air bersih (Water Security) di lokasi-lokasi terpilih menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan dan memenuhi standar kelayakan industri. Secara spesifik, hasil survei lapangan memberikan temuan yang sangat positif pada lokasi Gratitunon (Kecamatan Grati). Tim teknis mencatat keberadaan sumber air permukaan alami dengan dimensi yang cukup masif, yakni 6x2 meter, dengan karakteristik debit air yang terbukti stabil meskipun di musim kemarau.

Keberadaan sumber air mandiri di lokasi Grati ini menjadi aset strategis yang sangat bernilai. Ketika dikombinasikan dengan jaringan perpipaan PDAM Kabupaten Pasuruan yang telah terpasang melintasi jalur utama lokasi tersebut, maka terciptalah

sebuah jaminan suplai ganda atau redundancy system. Sistem redundansi ini sangat krusial sebagai mitigasi risiko untuk memastikan operasional dapur tidak berhenti total apabila salah satu sumber mengalami gangguan. Hal ini menjadi prasyarat mutlak untuk memenuhi kebutuhan sanitasi skala industri yang masif, mulai dari proses pencucian tonase bahan baku segar (sayur, daging, buah) hingga sterilisasi peralatan masak dan alat makan siswa. Diproyeksikan, aktivitas harian ini akan membutuhkan volume air mencapai ribuan liter yang harus tersedia tanpa henti (continuous supply) demi menjaga standar kesehatan pangan.

Di sisi lain, aspek jaminan pasokan energi (Energy Security) juga telah dipetakan secara matang dan komprehensif melalui inisiasi kolaborasi ini bersama PLN Wilayah Pasuruan. Hal ini didasari pemahaman bahwa Dapur Modern SPPG bukanlah dapur konvensional, melainkan fasilitas yang akan dilengkapi dengan berbagai peralatan heavy-duty berteknologi tinggi. Keberadaan Walk-in Chiller dan Freezer berkapasitas besar menjadi jantung operasional untuk menjaga rantai dingin (cold chain) bahan baku protein hewani, serta penggunaan oven konveksi berskala industri untuk efisiensi memasak. Seluruh peralatan ini menuntut suplai listrik tegangan menengah dengan stabilitas daya yang prima; fluktuasi arus listrik sedikit saja dapat berisiko merusak peralatan mahal tersebut atau, yang lebih fatal, merusak kualitas bahan makanan yang tersimpan.

Kabar baiknya, hasil survei teknis di lokasi Gayam (Kecamatan Gondang Wetan) dan Gempeng (Kecamatan Bangil) mengonfirmasi kesiapan infrastruktur kelistrikan yang superior. Tim menemukan bahwa tiang listrik beton dan gardu distribusi PLN telah tersedia tepat di titik batas lahan (on-site boundary). Kondisi eksisting ini memberikan keuntungan efisiensi waktu dan biaya yang signifikan, karena proses penyambungan daya baru (new connection) dapat dieksekusi dengan cepat (program "Penyambungan Sementara" atau "Pasang Baru Premium") tanpa memerlukan investasi pembangunan jaringan tiang tambahan yang biasanya memakan waktu lama dan birokrasi yang rumit.

Melengkapi kesiapan infrastruktur fisik, ketersediaan infrastruktur digital juga menjadi sorotan utama yang tidak luput dari evaluasi tim survei. Di era transformasi digital pemerintahan, ketersediaan jaringan serta akses Fiber Optik di seluruh lokasi prioritas menjadi indikator kelayakan yang vital. Hasil pemetaan sinyal memastikan

bahwa sistem pelaporan berbasis digital dapat berjalan optimal tanpa area blank spot. Konektivitas internet yang stabil dan berkecepatan tinggi ini merupakan prasyarat mutlak untuk pengoperasian Dashboard Monitoring Nasional yang terintegrasi. Sistem ini memungkinkan seluruh rantai data mulai dari input penerimaan barang dari vendor, pemantauan stok gudang harian, hingga unggah bukti foto serah terima makanan di sekolah dapat dilakukan secara real-time. Dengan infrastruktur penunjang yang lengkap dan terintegrasi ini, SPPG Kabupaten Pasuruan dinyatakan memiliki tingkat kesiapan teknis paripurna untuk mendukung operasional dapur yang tidak hanya produktif, tetapi juga transparan, akuntabel, dan berstandar tinggi.

4.5 Tantangan Lapangan dan Strategi Mitigasi

Meskipun hasil analisis kelayakan secara umum menunjukkan tingkat kesiapan wilayah yang tinggi, survei lapangan yang mendalam berhasil mengidentifikasi sejumlah tantangan teknis spesifik yang tidak bisa diabaikan. Tantangan-tantangan ini menuntut adanya intervensi rekayasa sipil (civil engineering intervention) yang presisi dan terencana sebelum tahapan konstruksi fisik dimulai. Tantangan yang paling signifikan dan memerlukan perhatian khusus ditemukan pada lokasi Gratiunon (Klaster Grati). Berdasarkan pengukuran topografi, elevasi lahan di lokasi ini berada sekitar satu meter di bawah permukaan jalan raya utama. Kondisi ini diperumit dengan adanya saluran drainase sekunder yang cukup lebar melintang di sepanjang fasad depan lahan, memisahkan area jalan dengan area rencana pembangunan.

Kondisi eksisting di Grati tersebut membawa dua risiko operasional utama. Pertama, perbedaan elevasi dan halangan drainase berpotensi menghambat aksesibilitas dan manuver armada logistik berat yang akan keluar-masuk setiap hari. Kedua, posisi tanah yang lebih rendah meningkatkan risiko terjadinya genangan air atau banjir lokal pada area operasional dapur saat musim hujan, yang dapat mengganggu higiene dan proses produksi. Sebagai strategi mitigasi yang komprehensif, Dinas Bina Marga dan Dinas SDA Cipta Karya telah merumuskan solusi teknis terpadu. Solusi ini mencakup pekerjaan pengurugan dan pemadatan tanah (massive cut and fill/landfill) untuk menaikkan level lantai bangunan agar sejajar atau lebih tinggi dari jalan. Selain itu, aksesibilitas akan diamankan melalui pembangunan jembatan akses menggunakan konstruksi box culvert beton bertulang.

Struktur ini dirancang khusus dengan spesifikasi teknis tinggi agar mampu menahan beban tonase kendaraan truk pengangkut bahan baku yang intensif, menjamin kelancaran rantai pasok dalam jangka panjang.

Di luar tantangan fisik dan teknis, aspek legalitas serta pengamanan aset menjadi sorotan utama dalam kerangka manajemen risiko proyek. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang sangat ketat untuk memastikan status seluruh lahan yang digunakan benar-benar "Clean and Clear". Langkah ini bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan upaya preventif vital guna menghindari potensi sengketa hukum, klaim kepemilikan pihak ketiga, atau konflik sosial di kemudian hari yang dapat memaksa penghentian operasional program di tengah jalan. Dalam konteks ini, tim verifikasi aset telah bekerja ekstra melakukan pemeriksaan silang (*cross-check*) terhadap validitas dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) Pemerintah Daerah untuk setiap lokasi yang diusulkan. Konfirmasi legalitas yang berlapis ini menjadi fondasi mitigasi non-teknis yang krusial, memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi kontraktor pelaksana untuk segera memulai mobilisasi alat berat dan pembangunan fisik tanpa keraguan, sekaligus menjamin keamanan keberlanjutan investasi infrastruktur daerah untuk jangka panjang.

Tantangan terakhir yang teridentifikasi, dan tidak kalah kritikal, adalah terkait manajemen waktu (*time management*) dalam menghadapi tenggat penyelesaian program yang sangat ketat. Kompleksitas proyek ini terletak pada kebutuhan koordinasi lintas sektor yang masif, yang mempertemukan penyediaan infrastruktur fisik (air, listrik, konstruksi bangunan) dengan persiapan aspek operasional (rekrutmen SDM, rantai pasok bahan baku). Situasi ini berisiko tinggi menimbulkan sumbatan birokrasi (*administrative bottleneck*) jika dikelola dengan pola kerja linier biasa. Untuk memitigasi risiko keterlambatan tersebut, pembentukan Satgas Percepatan MBG dengan struktur komando tunggal terbukti menjadi solusi manajerial yang paling efektif. Keberadaan Satgas ini memungkinkan penerapan mekanisme kerja paralel (*parallel processing*), di mana proses perizinan, administrasi, penyambungan utilitas oleh PLN dan PDAM, serta persiapan konstruksi sipil dapat berjalan secara simultan. Dengan metode ini, setiap sektor tidak perlu saling menunggu proses sektor lain selesai, memastikan seluruh ekosistem SPPG dapat siap beroperasi (*ready to operate*) tepat pada waktunya sesuai jadwal target nasional.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian analisis komprehensif mulai dari pemetaan regulasi, konsolidasi kelembagaan, hingga uji tuntas (due diligence) kelayakan teknis lapangan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan memiliki Tingkat Kesiapan Tinggi (High Readiness Level) untuk melaksanakan Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Kesimpulan ini didasarkan pada tiga indikator utama yang telah terverifikasi:

1. Kekokohan Institusional: Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan MBG yang bersifat lintas sektoral membuktikan bahwa program ini tidak berjalan secara parsial. Sinergi antara Bappelitbangda, Dinas Teknis, dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sejak fase perencanaan menjamin akuntabilitas tata kelola dan kepastian hukum.
2. Kelayakan Infrastruktur Produksi: Penetapan tiga klaster lokasi strategis khususnya Klaster Gondang Wetan yang diproyeksikan sebagai Mega Kitchen menunjukkan kematangan perencanaan operasional. Dukungan utilitas vital (air dan listrik) yang memadai serta aksesibilitas logistik yang prima menjadi jaminan bahwa rantai pasok makanan tidak akan terputus.
3. Ketepatan Sasaran dan Strategi Distribusi: Pemetaan data sasaran yang presisi by name by address (BNBA) terhadap ribuan siswa dan kelompok rentan, yang dipadukan dengan strategi distribusi "Tiga Kloter", merupakan solusi teknis yang cerdas untuk mengatasi tantangan geospasial dan menjaga standar mutu makanan tetap hangat saat diterima.

Secara keseluruhan, Kabupaten Pasuruan tidak hanya siap menjadi pelaksana, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menjadi Pusat Percontohan Nasional (National Pilot Project) dalam manajemen operasional MBG yang terintegrasi, transparan, dan berdampak ekonomi luas.

5.2 Rekomendasi

Guna menjamin keberlanjutan (sustainability) dan optimalisasi dampak program di masa depan, direkomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Digitalisasi Sistem Monitoring: Disarankan untuk segera mengembangkan atau mengintegrasikan sistem pelaporan berbasis aplikasi (real-time dashboard) yang menghubungkan data produksi di dapur dengan data penerimaan di sekolah. Hal ini penting untuk meminimalisir kebocoran anggaran dan memastikan validitas data klaim pembayaran secara harian.
2. Penguatan Ekosistem Ekonomi Lokal: Pemerintah Daerah perlu membuat regulasi turunan yang "mengunci" kewajiban penyerapan bahan baku lokal. Koperasi, BUMDes, dan Petani lokal harus diposisikan sebagai rantai pasok utama (main supplier) sayur, telur, dan beras, sehingga multiplier effect ekonomi benar-benar dirasakan oleh warga Pasuruan, bukan oleh vendor besar dari luar daerah.
3. Mitigasi Risiko Kesehatan: Mengingat skala produksi yang masif (ribuan porsi per hari), disarankan agar Dinas Kesehatan melakukan uji petik keamanan pangan (food safety test) secara berkala dan acak, tidak hanya pada produk akhir, tetapi juga pada sanitasi peralatan dan higiene penjamah makanan, guna mencegah risiko kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan.
4. Evaluasi Berkala Skema Distribusi: Penerapan skema distribusi "Tiga Kloter" perlu dievaluasi efektivitasnya setiap bulan. Jika ditemukan kendala kemacetan atau keterlambatan, Satgas harus berani melakukan rekayasa ulang rute logistik atau menambah armada distribusi berbasis komunitas (motor roda tiga) untuk menjangkau titik-titik yang sulit diakses kendaraan roda empat.

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan
dan Pengembangan Manusia

HERU MAULANA, S.Sos.